

UNMUL MENUJU PTN-BH, PERBAIKAN KUALITAS ATAU SEMATA KEJAR PERINGKAT?

Polemik UKT
Mencekik dalam
PTN-BH

Siap Bertransformasi
Menjadi PTN-BH:
Akankah Kesejahteraan
Dosen dan Tendik Unmul
Terjamin?

Potensi Lame Duck
Rencana PTN-BH
Unmul



DAFTAR ISI

SALAM PERS..... 2

STRUKTUR LEMBAGA..... 3

LAPORAN UTAMA

Polemik UKT 4
Mencekik dalam
PTN-BH

LAPORAN UTAMA

Siap Bertransformasi 8
Menjadi PTN-BH:
Akankah
Kesejahteraan Dosen
dan Tendik Unmul
Terjamin?

LAPORAN UTAMA

Menilik 14
Implementasi PTN-
BH yang Ideal di
Indonesia

WANSUS

Punya Banyak 17
Rencana Jangka
Panjang, BPU
Unmul Optimis
Siap Menyongsong
PTN-BH

LIFESTYLE

Di Antara Bayang- 22
bayang Organisasi
dan Perkuliahan:
Menilik Hustle Culture
di Lingkup Ormawa
Unmul

OPINI

Potensi Lame Duck 27
Rencana PTN BH
Unmul

IPTEK

Kesempatan atau 30
Ancaman?
Kehadiran Chat GPT
bagi Dunia
Akademis: Dari
Efisiensi Hingga
Potensi Minim Kritis

PUISI

Di Mana? Saja 34

CERPEN

Antara Impian dan 35
Tanggung Jawab

INFOGRAFIS

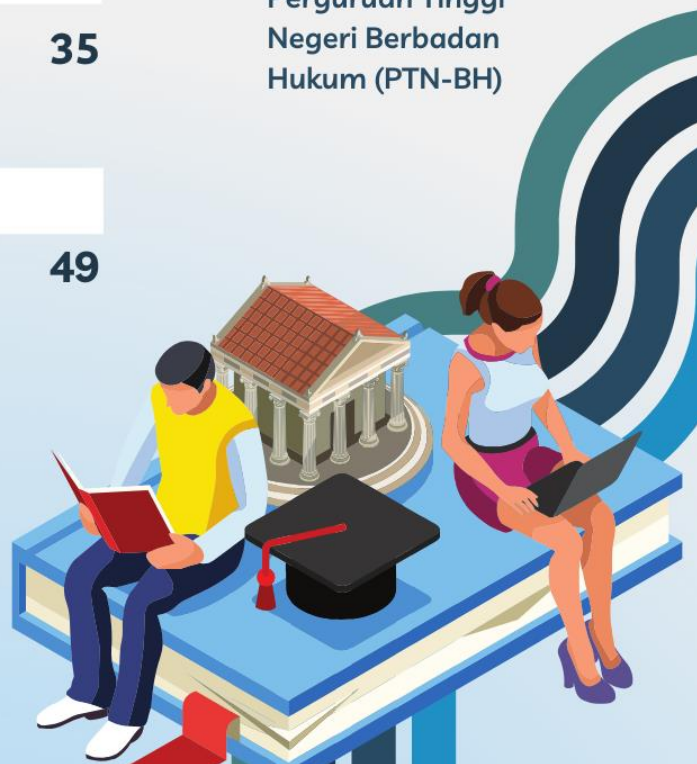
SURVEI: Pandangan 39
Mahasiswa Unmul
Terhadap Rencana
Unmul Menjadi
Perguruan Tinggi
Negeri Berbadan
Hukum (PTN-BH)

KOMUNITAS

1000 Guru 46
Samarinda:
Dedikasi Para Anak
Muda untuk
Memajukan
Pendidikan
Indonesia

LENSA

Potret Fasilitas 49
Unmul: Sudahkah
Layak
Menyandang
Status PTN-BH?



STRUKTUR

LEMBAGA PERS MAHASISWA

SKETSA UNMUL 2023



Pelindung	Dr. Ir. H. Abdunnur., M.Si., IPU
Penasihat	Prof. Dr. H. Moh. Bahzar, M.Si
Pembina	Dr. Rina Juwita, S.IP., M. HRIR. Herdiansyah Hamzah, S.H., LL.M.
Ketua Umum	Khoirun Nisa
Sekretaris	Shania Lutfiah Nur Callista
Bendahara	Sari Dewi Handayani
Ketua Redaksi	Nindiani Kharimah
Redaktur Pelaksana	Audrey Apridella Moudini Efrianti Muhnizar Sari
Redaktur Online	Marcello Ahimsa Hayamaputra Siti Nurmasyitah
Reporter	Novia Rahmawati Ananda, Luthfi Orfakha, Khansa Yumna Abiyyu, Firza Amalia Putri, Siti Aisyah, Andi Berbi, Julia Oriana, Wisda Aprilia Syaka, Masriani
Fotografer	An Nisa, Zaynab Army, Sijaya, Alya Hanifah, Raihan Eka Saputra
Desainer/Layouter	Putri Amalyah Jahra, Reza Ferdyan, Siregar, Lasmaria Melyani, Khittah Muslimah, Lamriama Putri Lestari, Firdausyi Nuzulla, Muhammad Saudi Firdaus, Virdha Andini Maharani, Viola Nadhya Estyvani, Ida Lestari, Aqwam Naufal Fadhlullah
Videografer	Luthfi Ahmadani Rahman, Moh. Fikran H
Ketua Penelitian dan Pengembangan (Litbang)	Siti Rahmi
Koordinator Sub Penelitian	Silmi Nur Kamilla
Koordinator Sub Pengembangan	Ana Monika Guinet
Anggota	Muhammad Adil Alparizi, Nurvidya Sistha Azzahra, Rhaudatul Fitri, Atirah Keimas, Jeni Ananda Nur Islam
Staf Magang	Alvis, Fatih, Gunawan, Anis, Nazmiah, Mega, Widya, Feby, Hanny, Rayyan, Rafika, Ai, Disthia, Salwa, Risna, Siti, Sinar, Ryan, Nanda, Yaasiina, Rahmi, Ayu, Sari, Dea, Fadly, Adit, Sangga, Alpen, Adzra, Andan, Alyda, Saina, Rival, Deli, Selma, Bella, Novia, Febby Sofiana, Sabrina



Sumber : unmul.ac.id

Polemik UKT Mencekik dalam PTN-BH

Sebut saja namanya Chekov (nama samaran). Ia merupakan salah satu mahasiswa Universitas Mulawarman Angkatan 2022. Bekas Mahasiswa lebih tepatnya. Sebab, pasca berjuang untuk melakukan penurunan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang tak kunjung dikabulkan oleh pihak universitas, ia terpaksa harus putus kuliah karena tak mampu lagi membayar.

“Saat itu ia harus melewati proses administrasi yang ribet,” ungkap Muhammad Rafly Pratama, yang notabene merupakan teman sekelasnya. Rafly bernasib sedikit lebih beruntung, sebab meskipun tidak berasal dari keluarga berada, ia mendapatkan beasiswa melalui program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP - K) sehingga tak perlu memusingkan biaya UKT.

Chekhov bukan satu-satunya mahasiswa yang mesti putus kuliah. Dalam sebuah diskusi publik bertajuk *Kampus Dalam Kepungan Komersialisasi Pendidikan* yang digelar oleh Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) pada awal tahun 2023, akademisi program studi Pembangunan Sosial Sri Murlianti turut bercerita tentang salah satu mahasiswa yang bernasib serupa.

“Sibuk bekerja untuk biaya kuliah, sampai akhirnya kuliahnya terbengkalai,” ungkapnya lirih saat itu, menggambarkan betapa kontradiktifnya situasi yang mesti dialami mahasiswa yang mengalami kesulitan secara finansial.

Situasi ini, dalam diskusi yang tersebut dinilai akan bertambah pelik. Alasannya adalah rencana Unmul menjadi Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTN-BH).



Muhammad Rafly Pratama

Mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP Unmul 2022

LAPORAN UTAMA

Menilik PTN-BH

Apa itu PTN-BH?

PTN-BH merupakan salah satu status perguruan tinggi dalam pengelolaan, dimana menurut Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, terdapat tiga pola pengelolaan PTN, yaitu PTN dengan pola pengelolaan keuangan negara pada umumnya yang dikenal dengan PTN Satker, PTN dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum atau BLU, serta PTN-BH.

PTN BH menurut PP No.26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTN BH adalah badan hukum publik yang otonom. Otonom yang dimaksud disini adalah dimana kampus dengan status PTN-BH memiliki otonomi penuh dalam mengelola keuangan dan sumber daya, termasuk dosen dan tenaga kependidikan.

Lantas, dimana salahnya?

“PTN-BH itu ibarat jebakan Batman,” ucap Sri Murlianti saat dihubungi melalui WhatsApp pada Minggu (15/11/23).



Dr. Sri Murlianti, M.Si

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unmul

Ia memaparkan, meskipun dengan status PTN-BH kampus dapat lebih mandiri dan leluasa mengembangkan diri, namun status PTN-BH sendiri sejatinya adalah upaya lepas tangan pemerintah terhadap tanggung jawab mengurus pendidikan warga negaranya. Status ini, sebutnya akan mem-

buat dana pemerintah untuk pembiayaan kampus berkurang.

“Justru kemudian kampus dituntut berinovasi untuk pembiayaan penyelenggaraan pendidikan,” sebutannya. Situasi ini berpotensi berbahaya, sebab mahasiswa akan menjadi sasaran empuk untuk mendapatkan pendanaan, salah satunya dengan peningkatan biaya UKT.

Terdapat beberapa contoh universitas yang menaikkan UKT dampak dari perubahan status menjadi PTN-BH. Salah satunya adalah Universitas Diponegoro yang pada 2016 menaikkan UKT dikarenakan berkurangnya dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dari pemerintah yang merupakan implikasi dari otonomi PTN-BH.

Mengutip artikel yang dimuat oleh Lembaga Pers Mahasiswa Universitas Diponegoro Manunggal, kenaikan UKT dampak PTN-BH kala itu tidak hanya berlaku bagi mereka yang mengikuti ujian mandiri, namun juga mereka yang melalui jalur SNMPTN maupun SBMPTN. Kenaikan UKT di Undip, kala itu berdampak kepada semua golongan UKT.

“Universitas yang lebih besar saja terseok-seok ketika menjadi PTN-BH,” sebutnya.

Bantahan Rektor Abdunnur

Sketsa kemudian melakukan upaya konfirmasi kepada Rektor Unmul Abdunnur pada Kamis (26/10/23). Proses wawancara dilakukan di ruang kerjanya yang terletak di lantai 3 Gedung Rektorat Universitas Mulawarman.



Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si, IPU

Rektor Universitas Mulawarman

LAPORAN UTAMA

Akademisi FPIK tersebut menyebutkan bahwa proses transformasi Unmul dari PTN-BLU menjadi PTN-BH berlangsung dengan baik. Terkait beberapa indikator yang menjadi persyaratan dalam menjadi PTN-BH, Unmul telah memenuhinya.

“Alhamdulillah melampaui batas minimum skoring,” ujarnya. Ia menyebutkan bahwa pada tahun 2024 mendatang ia berencana untuk melakukan tindak lanjut ke pemerintah terkait pengajuan Unmul menjadi PTN-BH.

Terkait anggapan bahwa PTN-BH akan membuat biaya UKT semakin mahal, pria yang baru saja meraih gelar guru besarnya tersebut membantah. Ia memaparkan, bahwa penerimaan Unmul juga akan ditingkatkan melalui pengelolaan aset serta kegiatan pengelolaan usaha.

“Yang kami tingkatkan justru pendapatan di luar UKT,” ucapnya.

Ia juga menyebutkan beberapa usaha Unmul dalam menaikkan pendapatan. Salah satunya melalui riset-riset akademik. Ia menyoroti banyaknya laboratorium di Unmul yang dapat membantu dalam menaikkan pendapatan kampus.

“Melalui bahan analisis data, sampel, dan sebagainya,” paparnya. Ia berjanji bahwa status Unmul sebagai PTN-BH nantinya tidak serta merta akan menaikkan biaya UKT.

Logika Pasar PTN-BH

Sri Murlianti mengakui, bahwa kampus dapat mengatasi proses pendanaan tatkala menyandang status PTN-BH dengan menggandeng mitra-mitra baik dari pemerintah maupun perusahaan untuk penelitian. Ia pun mengakui bahwa ada sisi baiknya juga dari hal tersebut.

“Kampus dapat mengembangkan pengetahuan yang lebih aplikatif, berguna dan praktis,” ujarnya.

Namun, di satu sisi ia menyebutkan bahwa hal tersebut jika beresiko mengurangi daya kritis *civitas academica*. Penelitian akhirnya dilakukan



LAPORAN UTAMA

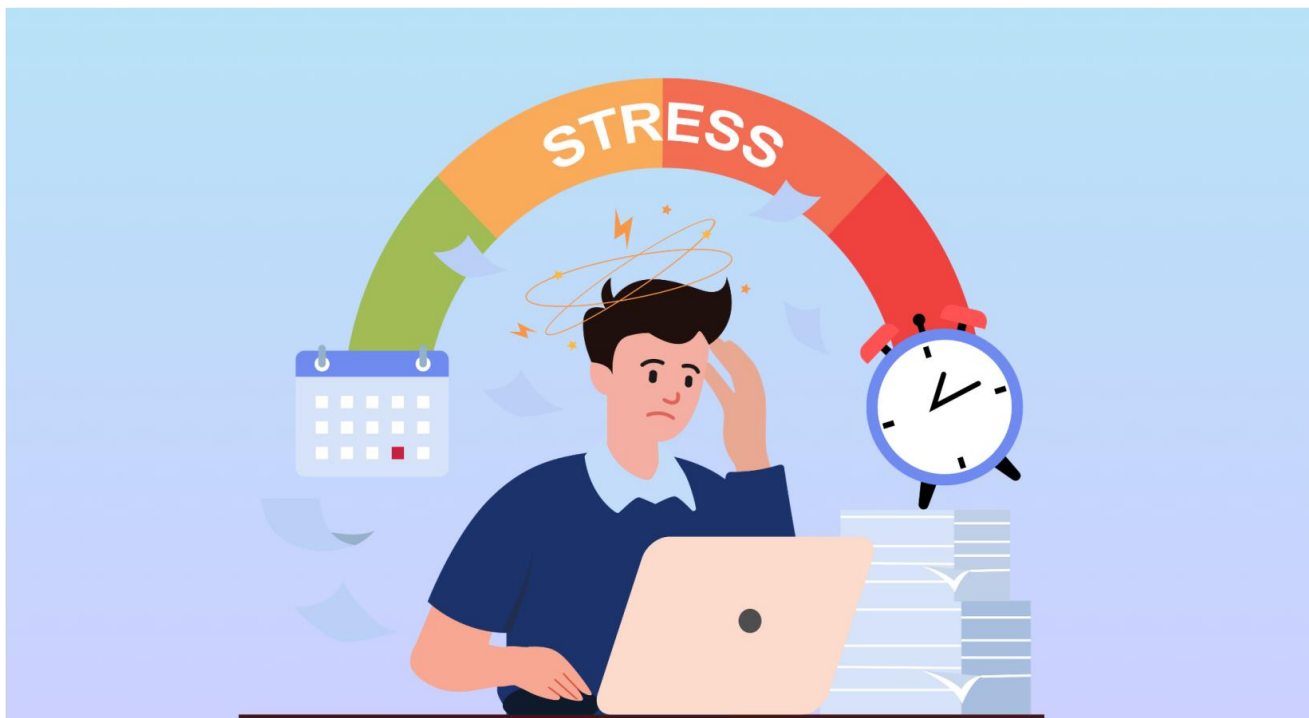
bukan murni untuk ilmu pengetahuan, namun untuk memperoleh cuan.

Ia juga menyorot satu kemungkinan lain, dimana keberadaan sebuah program studi ditentukan oleh popularitasnya. Sehingga akan ada kemungkinan sebuah program studi tutup karena tak menguntungkan secara finansial. Padahal, ada beberapa tipologi ilmu pengetahuan yang kurang populer namun dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat.

“Jangan sampai kemudian mengubah arah idealisme pendidikan menjadi idealisme pasar,” pungkasnya.

Tim Liputan: Audrey Apridella Moudini, Hanny Fakhriah Syafitri, Muhammad Al Fatih, M. Gunawan Wibisono, Nazmiah Nur Fadilla, Risna, Siti Aisyah.

Editor: Nindiani Kharimah



Siapa Bertransformasi Menjadi PTN-BH: Sudahkah Kesejahteraan Dosen dan Tendik Unmul Terjamin?

Unmul boleh dibilang jadi universitas raksasa di Kalimantan Timur. Telah berdiri sejak tahun 1962 silam membuatnya dikenal oleh masyarakat. Terlebih, pembangunan kampus “Pusat Unggulan Studi Tropis” itu cukup masif dari tahun ke tahun. Ditambah lagi dengan segudang pencapaian yang telah diraih.

Di masa kini, Unmul cukup ambisius dalam mengambil langkah untuk melebarkan sayapnya. Apalagi, pembangunan IKN yang sudah di depan mata. Tak tanggung-tanggung, Unmul yang saat ini berstatus sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) dikabarkan tengah bersiap untuk bertransformasi menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH).

Keputusan yang cukup berani itu tak ayal kerap jadi bahan diskusi oleh civitas academica. Banyak yang berpendapat bahwa sejumlah dampak

akan membuntuti apabila Unmul benar-benar merubah statusnya menjadi badan hukum. Kesejahteraan dosen dan tenaga pendidik (tendik) jadi salah satu dampak yang akan menghampiri.

Perguruan tinggi berstatus PTN-BH memiliki otonomi yang lebih besar dalam mengelola keuangan dan operasional mereka. Salah satu tujuan utama dari PTN-BH adalah untuk menghasilkan pendapatan tambahan yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, dalam upaya untuk mencapai target pendapatan tertentu, ada potensi bahwa dosen dan tendik akan mengalami peningkatan beban kerja dan tekanan yang lebih tinggi.

Perguruan tinggi perlu memperhatikan dampak potensial dari penekanan pada pendapatan tambahan ini dan memastikan bahwa kesejahteraan dosen dan tendik tetap menjadi prioritas. Langkah-

LAPORAN UTAMA

langkah seperti pengembangan kebijakan yang adil, dukungan yang memadai, dan keterlibatan dosen dan tendik dalam pengambilan keputusan perlu dipertimbangkan. Lantas, apakah kesejahteraan dosen dan tendik dapat dijamin ketika Unmul telah bertransformasi menjadi PTN-BH?

Kesejahteraan Dosen di Ambang Ketidakpastian



Beberapa waktu lalu, tepatnya pada Kamis (25/10), awak *Sketsa* berkesempatan untuk mewawancarai Sri Murlianti, salah satu Akademisi FISIP Unmul. Kepada *Sketsa*, dirinya membagikan pandangannya terhadap kesiapan Unmul dalam menyejahterakan dosen dan tendik. Ia menegaskan bahwa hubungan langsung antara perubahan status menjadi PTN-BH dengan kesejahteraan tendik bukanlah hal yang pasti.

Baginya, peningkatan kesejahteraan tendik bergantung pada niat baik dan kebijakan yang diterapkan, independen dari status perguruan tinggi tersebut. Ia turut menekankan, baik dengan status PTN-BH atau tanpa status tersebut, pemahaman dan implementasi kebijakan yang tepat adalah kunci dalam memastikan kesejahteraan staf pendukung.

“Jadi, persoalannya itu adalah political will, *even* statusnya PTN-BH atau bukan, mau menyejahterakan karyawan itu kan bergantung pada

political will dan sistem yang dijalankan seperti apa,” terang Sri.

Sri juga menggarisbawahi bahwa persoalan kesejahteraan dosen dan tendik sudah menjadi masalah besar sebelum Unmul berencana untuk bertransformasi menjadi PTN BH.

“Di atas kertas memang belum siap, karena penataannya gimana, *sih*, ‘kan kalau kita ngomongin PTN-BH itu ‘kan tuntutan pengelolaan mandiri.”

Ia memahami bahwa Unmul akan menghadapi tantangan berat dalam mencapai efisiensi dan efektivitas, terutama ketika harus beroperasi sebagai entitas yang lebih mandiri. Dosen Prodi Pembangunan Sosial itu menilai bahwa perubahan status Unmul menjadi PTN-BH tentu akan berdampak ke UKT mahasiswa.

Menyoal dampak dari pergantian status menjadi PTN-BH pada upah dosen misalnya, Sri menjelaskan bahwa tingkat upah dosen akan menyesuaikan pada kemampuan Unmul untuk menghasilkan pendapatan lembaga yang memadai.

Namun, dampaknya akan bergantung pada bagaimana dana tersebut dialokasikan dan apakah kesejahteraan dosen menjadi prioritas. Sri Murlianti mengatakan bahwa peningkatan UKT adalah cara termudah untuk mengatasi defisit keuangan, meskipun itu akan menjadi beban bagi mahasiswa dan masyarakat.

“Kemandirian kampus sebenarnya yang digagas sebagai kemandirian intelektual itu ‘kan bukan cari uang sendiri, membiayai sendiri.”

Berbicara mengenai masa depan kesejahteraan dosen, Sri menjelaskan bahwa nasib kesejahteraan dosen akan sangat bergantung pada sejauh mana kebijakan Unmul berfokus pada kesejahteraan dosen, kualitas kebijakan, dan pengelolaan keuangan yang transparan.

LAPORAN UTAMA

Sri juga memperingatkan bahwa mengejar pendapatan dalam upaya menjaga keberlanjutan keuangan dapat mengorbankan pengembangan keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan berpikir yang mana ketiga hal itu harus diutamakan.

“Tetapi, kemudian universitas dituntut untuk mencari penghasilan ‘kan repot. Kemandirian kampus yang digagas bukan itu, kampus jadi sulit independen secara kualitas,” tuturnya.

Sketsa turut menyinggung pernyataan Rektor Unmul terkait kinerja dosen yang akan menjadi dasar untuk penentuan upah. Sri mengonfirmasi bahwa Unmul telah mengadopsi Sistem Kerja Pegawai (SKP) yang mengukur kinerja dosen dan memberikan nilai sesuai dengan prestasi akademik mereka. Hal ini memastikan bahwa kinerja dosen adalah faktor utama dalam menentukan upah mereka, dengan standar yang jelas yang tidak bisa diganggu-gugat.

“Sebelum PTN-BH atau tidak PTN-BH itu sama, standarnya sudah sangat jelas gitu,” pungkasnya.

Potensi Tergerus Posisi Tawar Pekerja Kampus

Senin (16/10) lalu, awak *Sketsa* turut mewawancarai Nasrullah, Akademisi FIB Unmul yang turut serta mengawal transformasi Universitas Hasanuddin menjadi PTN-BH kala menjadi mahasiswa. Melalui pesan suara WhatsApp, dirinya memandang bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum Unmul siap untuk bertransformasi menjadi PTN-BH.

Berkaca ketika pandemi dan setelah pandemi melanda, ia mengungkapkan bahwa tunjangan dosen dan remunerasi dosen sempat mengalami penurunan pemasukan dari Unmul.

Dosen Prodi Sastra Inggris itu menilai bahwa sebelum melakukan perubahan status dan berbicara mengenai kesejahteraan dosen, Unmul tentunya harus menggalakkan seluruh unit-unit usahanya terlebih dahulu.

“Jangan sampai misalnya begitu berubah status, kita (dosen) harus mencari rezeki ini, sementara aset-aset dan unit-unit usaha belum siap untuk itu. Makanya (perubahan menjadi PTN-BH) berdampak kepada gaji pegawai dan tendik, terutama tunjangan,” imbuh Nasrullah.

Selain upah, persoalan lain yang timbul dari perubahan status tersebut rupanya bermuara ke sejumlah dampak lainnya, yakni pergeseran orientasi akademik ke orientasi ekonomi karena PTN-BH berorientasi ke profit.

“Jadi, prodi-prodi yang dianggap akan menghasilkan mahasiswa atau peminat yang banyak, itu yang akan dibuka atau dipertahankan. Kemudian, prodi-prodi yang kurang memiliki peminat dan yang tidak dapat menghasilkan uang yang lebih banyak, itu bisa ditutup, dan dosennya dialihkan ke prodi yang lain.”

Selain itu, polemik lainnya yang turut dirasakan adalah sistem perhitungan angka kinerja dan metode pembayarannya. Hal itu sangat amat



kalkulatif, sebab target utama ketika sudah menjadi PTN-BH adalah memenuhi anggaran atau belanja.

Lebih lanjut, Nasrullah menjelaskan bahwa nantinya, dosen akan mendapatkan tugas tambahan yang bersifat *profit oriented*, di mana kinerja dosen bisa jadi berdampak ketika

LAPORAN UTAMA

kemampuan membayar Unmul untuk regenerasi atau tunjangan kerja menurun.

“Jadi, kinerja itu bisa tergantung dari kemampuan besaran tunjangan yang diberikan oleh Unmul. Karena, ‘kan untuk kita bekerja banyak kalau gaji atau upahnya tidak setara kan atau tidak adil begitu. Itu ‘kan bisa mempengaruhi kinerja itu sendiri. Itu yang paling penting.”

Jika menilik ke persoalan yang akan dihadapi, Nasrullah justru merasa bahwa rencana Unmul untuk menempuh jalur PTN-BH sebaiknya diurungkan. Sebab, meskipun layak dan siap berganti status ataupun memenuhi syarat untuk menjadi PTN-BH, Unmul harus mengubah total kultur dan sistem kerjanya, termasuk civitas akademiknya.

“Bukan hanya sekadar kinerja dosen yang akan berpengaruh, tapi bagaimana orientasi akademik ke profit itu nanti akan memengaruhi juga bagaimana relasi Unmul. Bukan hanya kepada pekerja dan mahasiswanya, tapi juga kepada masyarakat secara umum,” terangnya.

Ada yang bilang jika upah yang diterima oleh dosen dan tendik akan disesuaikan dengan kinerja mereka. Nasrullah setuju dengan itu. Ia pikir, pembagian upah sudah semestinya begitu tanpa perlu menunggu Unmul berubah menjadi PTN-BH terlebih dahulu. Sebaliknya, ia menyoroti persoalan lain yang dikhawatirkan akan timbul.

Ia merasa bahwa berubah statusnya Unmul menjadi badan hukum akan berpotensi mengundang polemik baru: kinerja dosen tidak dibayar sepenuhnya. Hal tersebut bisa saja terjadi ketika Unmul tidak mampu memenuhi anggaran belanjanya. Jika sudah begini, sudah pasti kinerja tenaga pengajar tidak akan dibayar dengan penuh.

“Bayangkan jika kita sudah menghitung poin kita misalnya sekian, kita akan dibayar sekian puluh juta untuk remunerasi selama satu semester atau satu tahun. Tapi, tiba-tiba yang kita terima adalah setengahnya, karena alasan pemasukan Unmul

tidak cukup untuk membayar itu, anggaran tidak cukup,” ucapnya cemas.

Tak hanya soal upah, persoalan terkait Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (PermenPAN-RB) tak luput dibahas. Nasrullah membenarkan bila perubahan status universitas menjadi badan hukum akan berpengaruh pada posisi tawar pekerja kampus sebab nantinya, Unmul akan dikelola layaknya korporat.

“Jadi, relasinya bukan lagi sebagai profesional sebagai dosen atau profesor, tapi, relasinya lebih kepada pekerja dan majikan ataupun bahasa ekonomi politiknya itu antara pemilik modal dan buruh, gitu.”

Tak lupa, dirinya menerangkan bahwa hal ini akan mengubah dinamika Unmul. Logikanya, Unmul yang telah menjadi PTN-BH dianggap sebagai badan usaha. Aset-aset di dalamnya dianggap sebagai kapitalisme. Universitas berbadan hukum pun boleh bekerja sama dengan korporat atau mungkin ada sistem penanaman modal untuk memenuhi biaya operasionalnya.

Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan mengenai keberlanjutan dan orientasi Unmul. Nasrullah menjelaskan, “Nanti, Unmul akan punya semacam komisariss yang terdiri dari unsur mahasiswa, dosen, tendik, dan unsur masyarakat. Di unsur masyarakat ini, boleh jadi adalah mereka yang menanamkan modalnya atau punya saham di universitas yang berbadan hukum itu.”

Kendati demikian, perubahan ini turut menciptakan ketidakpastian dalam posisi tawar pekerja kampus. Posisi tawarnya menjadi begitu lemah ketika berhadapan ke pemilik modal. Bahkan, pemilik modalnya itu boleh jadi adalah negara atau dari pihak Unmul itu sendiri, di mana relasinya sudah berubah.

Ketika disinggung menyoal sejauh mana dampak perubahan status ini akan dirasakan bagi

LAPORAN UTAMA

pekerja kampus, termasuk dosen dan tendik, Nasrullah menilai bahwa imbas dari perubahan itu cukup besar. Hal ini disebabkan oleh beralihnya status dari negeri menjadi institusi swasta atau setengah swasta. ungkapnya.

"Tentu dong posisi tawar ini sangat penting karena itu terkait dengan upah dan mekanisme kontrak atau mekanisme keamanan kerjanya," imbuhnya.

Ketika Unmul beralih ke status PTN-BH, pekerja kampus akan memiliki relasi yang berbeda, seperti yang terjadi dalam perusahaan swasta. Keberlangsungan karir mereka sebagai pekerja kampus itu sangat ditentukan di sini.

Status Aparatur Sipil Negara (ASN) mungkin akan terlindungi, namun, pekerja kontrak dan dosen yang bekerja berdasarkan kontrak rentan menghadapi risiko seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pembaruan kontrak yang kurang menguntungkan.

Dalam konteks perubahan ini, posisi tawar pekerja kampus menjadi sangat krusial. Kesempatan untuk mempengaruhi upah, perlindungan, dan kebijakan kerja akan sangat bergantung pada sejauh mana mereka dapat menjaga posisi tawar mereka dalam perubahan ini.

Pertanyaan-pertanyaan ini menyoroti sejumlah kendala yang mungkin dihadapi pekerja kampus di tengah perubahan institusional. Perubahan status Unmul menjadi PTN-BH membawa konsekuensi signifikan bagi kebijakan pendidikan dan kesejahteraan para pekerja kampus. Diperlukan perhatian lebih lanjut serta solusi yang bijak demi memastikan kesejahteraan mereka di masa mendatang.

PTN-BH dari Perspektif Tenaga Kependidikan

Rencana Unmul untuk mengubah statusnya menjadi PTN-BH tentu menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak. Ian Wahyuni, tenaga pendidik honorer jadi satu di antara mereka yang setuju bila

nantinya Unmul akan menyandang status sebagai PTN-BH.

Ketika telah menjadi badan hukum, harap Ian, Unmul mampu memperbaiki kualitas baik dari segi akademik maupun non akademik.

Berbicara mengenai dampak yang kerap ditakutkan, sebut saja kenaikan UKT mahasiswa atau pemotongan penghasilan dosen, Ian mengaku dirinya tak ambil pusing mengenai hal itu. Ia optimis bahwa Unmul sudah pasti akan memikirkan dan mempertimbangkan hal tersebut secara matang.



Ian Wahyuni, S.S., M.Hum.

Dosen Prodi Sastra Indonesia Unmul

"Kesejahteraan dosen, ya, sama seperti ke mahasiswa. Tidak mungkin universitas akan zalim kepada dosennya. Menurut saya, pasti sudah ada yang dipertimbangkan (dari) berbagai hal," tutur Ian memberi komentar.

Ian beranggapan bahwa langkah berani nan ambisius Unmul itu adalah jalan untuk menuju ke tingkat internasional dan dapat dipercaya untuk bisa bersanding dengan universitas ternama.

Meski begitu, dirinya tak menampik bahwa masih terdapat sederet pekerjaan rumah yang menanti Unmul ketika nantinya telah siap menjadi PTN-BH. Salah satu yang dirinya soroti adalah kurangnya usaha-usaha mandiri yang ada di Unmul.

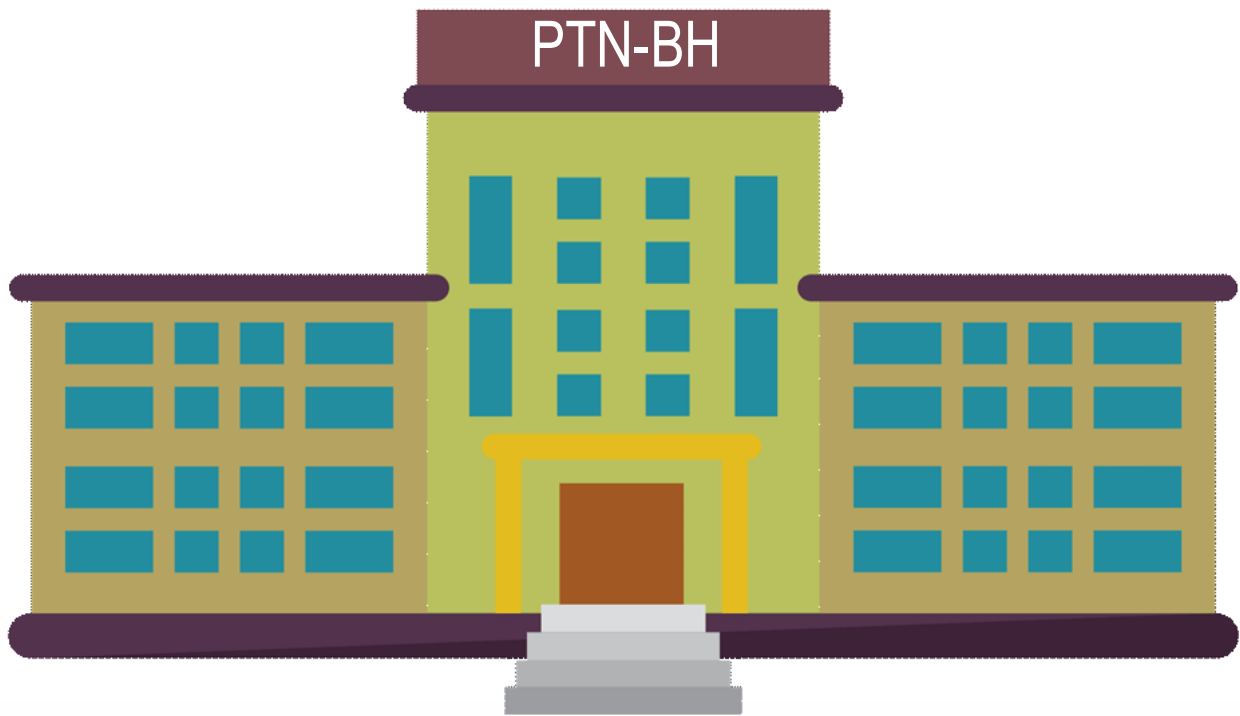
"Masalahnya Unmul ini yang kurang adalah usaha mandiri. Kalau Universitas Hasanuddin

LAPORAN UTAMA

(Unhas) kan ada rumah sakitnya yang betul-betul dia dalam lingkup (kampus Unhas), jadi memang pemasukannya banyak,” pungkas Ian.

Tim Liputan: Efianti Muhnizar Sari, Ai Nasyrah Nurdea, Anisa Dwi Lestari, Siti Mu'ayyadah, Firza Amalia Putri.

Editor: Audrey Apridella Moudini, Nindiani Kharimah



Menilik Implementasi PTN-BH yang Ideal di Indonesia

Implementasi PTN-BH di Indonesia tengah menjadi perbincangan masyarakat. Bukan tanpa sebab, pelaksanaan PTN-BH di Indonesia mengakibatkan beberapa PTN mematok angka Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang cukup tinggi bahkan melebihi uang kuliah di perguruan tinggi swasta (PTS).

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum atau PTN-BH sendiri merupakan konsep yang diusung pemerintah dimana perguruan tinggi diberikan status sebagai badan hukum publik dan diberikan hak otonom di bidang akademik dan non akademik. Konsep ini tertuang dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.

Otonom menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti: 1 berdiri sendiri; dengan

pemerintahan sendiri; daerah; dua kelompok sosial yang memiliki hak dan kekuasaan menentukan arah tindakannya sendiri. Artinya, status badan hukum memberikan keluasaan kepada perguruan tinggi untuk mandiri.

Adapun otonomi yang dimaksud di bidang akademik meliputi pelaksanaan pendidikan serta pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan bidang non akademik meliputi pelaksanaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan pelaksanaan pemanfaatan sarana dan prasarana.

Menilik sejarah PTN-BH di Indonesia, perjalanannya dimulai pada tahun 2000 dimana ditetapkan empat PTN pertama sebagai PTN berbentuk BHMN (Badan Hukum Milik Negara). Empat universitas tersebut antara lain Universitas

LAPORAN UTAMA

Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Pertanian Bogor, dan Institut Teknologi Bandung. PTN BHMN ini diberikan otonomi penuh dalam mengelola anggaran rumah tangga dan keuangan.

Lalu, pada tahun 2009, berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan PTN-BHMN digantikan dengan badan hukum pendidikan pemerintah. Di tahun 2010, UU tersebut dibatalkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009, dan mengembalikan status PTN-BHMN menjadi perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah yang tertuang dalam pemerintah Nomor 66 Tahun 2010.

Selang dua tahun kemudian, pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dimana seluruh perguruan tinggi eks BHMN, termasuk yang telah berubah menjadi perguruan tinggi yang diselenggarakan pemerintah, ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum.

Konsep perguruan tinggi dengan sistem pengelolaan keuangan yang fleksibel sendiri sudah dianut oleh universitas-universitas terbaik dunia termasuk, Harvard University. Bentuk fleksibilitas tersebut salah satunya ditunjukkan melalui pengumpulan dana dari donasi, khususnya dari perusahaan dan tokoh-tokoh top dunia. Sebagai universitas peringkat tinggi dunia, Harvard mengumpulkan milyar 1 US Dollar atau 15 Triliun Rupiah sejak 2013-2019 hanya dari donasi internasional.

Konsep inilah yang kemudian diimpikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud) di perguruan tinggi Indonesia. Keinginan menciptakan perguruan tinggi yang mandiri menjadi masuk akal mengingat dana APBN tidak cukup untuk mewujudkan pendidikan berkualitas dan maksimal bagi anak bangsa.

Akan tetapi, tingginya angka UKT di beberapa PTN-BH menandakan masih adanya kelemahan dalam pengimplementasiannya. Tak hanya itu, faktor pengawasan juga menjadi perhatian karena rawannya terjadi kesewenangan. Lalu, apa yang menjadi kunci keberhasilan PTN-BH?

Guna menjawab hal ini, awak *Sketsa* mewawancarai Susilo selaku Dekan FKIP Unmul dan pengamat pendidikan. Dalam wawancara pada Selasa (3/10) ia mengatakan bahwa kemandirian manajemen keuangan sebuah universitas menjadi kunci keberhasilan PTN-BH.



Susilo

(Dekan FKIP Unmul dan Pengamat Pendidikan)

“Artinya universitas di luar negeri itu ya kuncinya seperti itu, kemandirian pengelolaan. Nah, kemandirian pengelolaan itu kan nanti konsekuensinya memang universitas cari dana sendiri seperti BUMN kan, ya,” ungkapnya.

Ia pun turut menegaskan bahwa konsep pendidikan di Indonesia masih terikat dengan UUD 1945 pasal 31 yang menjelaskan bahwa pendidikan dikelola negara. Artinya, pendidikan tak hanya tanggung jawab bersama, tetapi negara juga.

LAPORAN UTAMA

Ia kemudian melanjutkan bahwa PTN-BH merupakan upaya agar universitas-universitas yang sudah menghasilkan banyak anggaran melalui riset, usaha, dan sumber dana lainnya dapat mengelola keuangan dengan lebih leluasa.

Akan tetapi, keleluasan ini harus pula diimbangi dengan pengawasan yang ketat dari pemerintah. Susilo menyarankan harus adanya manajemen keuangan satu pintu. Berkaca dari universitas-universitas besar, baik swasta maupun negeri selama ini, banyak yang kurang profesional apabila dihadapkan dengan masalah korporasi untuk mengelola keuangan.

Awak *Sketsa* turut menanyakan terkait kesiapan Unmul apabila ingin menjadi PTN-BH. Susilo kemudian memaparkan tiga potensi yang mampu dimanfaatkan Unmul untuk menyandang status PTN-BH.

Pertama, Unmul merupakan yang terbesar di Kalimantan Timur. **Kedua**, Unmul memiliki jumlah alumni yang banyak. **Ketiga**, Unmul berdekatan dengan IKN.

Ia juga mengatakan bahwa transformasi Unmul menjadi PTN-BH bukan lagi menyoal perlu atau tidak perlu, melainkan soal mau atau tidaknya untuk maju.

“Pokoknya citanya-citanya kalau ingin maju ya ke sana arahnya, sehingga kalau ingin maju sebuah universitas ya memilih (menjadi PTN-BH) itu,” ungkapnya.

Tak lupa, Susilo turut menekankan bahwa yang terpenting dalam implementasinya ialah untuk tidak melukai konsep pendidikan atau membesarkan angka UKT. Harus ada upaya kerja sama dengan *stakeholder* luar, salah satunya lewat modal intelektual seperti produk-produk riset, inovasi, hak cipta, hak paten, dan lain sebagainya.

Menurutnya, pemanfaatan modal intelektual Unmul jika ingin menjadi PTN-BH masih belum cukup. Dalam pemanfaatannya diperlukan

sinergitas antar universitas dan pelaku usaha atau *stakeholder*.

“Nah, kalau permasalahan ini (menciptakan sinergitas) tadi sudah *clear*, ya, sudah selesai. Enggak perlu khawatir yang UKT tadi. Istilahnya “ayo masuk semua,” lanjutnya.

Ia juga mengatakan bahwa kekhawatiran tentang tingginya angka UKT seharusnya tidak perlu ada. Alasan utamanya tak lain karena hal ini berbenturan dengan prinsip-prinsip filosofi pendidikan Indonesia, di mana negara harus hadir.

“Percuma saja kita jadi lembaga maju, tetapi yang sekolah orang-orang kaya, dan orang-orang miskin dipinggirkan. Berarti, kan, enggak membesarkan warga negara secara berkeadilan,” kuncinya.

Tim Liputan: Nindiani Kharimah, Khansa Yumna Abiyyu, Mega Sukima Ardiyanti.

Editor: Efrianti Muhnizar Sari



Punya Banyak Rencana Jangka Panjang, BPU Unmul Optimis Siap Menyongsong PTN-BH

"Unit usaha mitra turut berkontribusi positif menunjang operasional Unmul dalam memberikan pelayanan terbaiknya."

Setidaknya itu merupakan satu di antara 3 poin yang dicitrakan oleh Badan Pengelola Usaha (BPU) Unmul. Lembaga yang digadang mampu jadi tulang punggung untuk menghidupi perekonomian kampus, juga mengoptimalkan perolehan sumber pendanaan kampus untuk mendukung pengelolaan keuangan badan layanan umum universitas.

BPU Unmul sendiri diperkirakan lahir setelah Unmul ditetapkan sebagai satuan kerja yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) pada 2009, berdasarkan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.05/2009 tertanggal 27 Februari 2009.

Singkatnya, status BLU mendorong perguruan tinggi untuk mampu secara mandiri dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Status BLU membuat Unmul memiliki "Otonomi Level Kedua". Pengelolaan institusi ini mirip dengan rumah sakit milik negara. Kampus memiliki otonomi dalam mengelola pendapatan non-pajak mereka.

Status BLU tadi, memiliki tingkat otonomi yang lebih rendah daripada PTN-BH. Sebab PTN-BH memberikan kampus sebagai "Otonomi Penuh". PTN-BH merupakan tingkatan tertinggi dalam hal otonomi.

Ini membuat kampus memiliki otonomi penuh dalam mengelola keuangan dan sumber daya, termasuk dosen dan tenaga kependidikan (Tendik). Kampus memiliki kontrol penuh atas aset dan mandiri secara finansial, tidak lagi bergantung pada UKT mahasiswa sebagai pendanaan.

Belakangan, Unmul ingin mengubah statusnya dari PTN-BLU menjadi PTN-BH. Dalam hal ini, Unmul berusaha untuk berstatus otonomi penuh. Untuk menuju kesana, perlu adanya penguatan pada pengelolaan (BPU). Terutama dalam hal aset dan segala bidang usaha di kampus.

Sketsa kemudian menemui Kepala Badan Pengelola Usaha, Husni Thamrin untuk menilik kesiapan BPU Unmul menyongsong Unmul menjadi PTN-BH, berbagai usaha yang tengah dikelola, serta rencana jangka panjang BPU menggawangi kemandirian Unmul. Simak wawancara khusus (Wansus) *Sketsa* kali ini.

Bagaimana BPU di Unmul?

Pengurus BPU sendiri dibentuk sesuai dengan SK Rektor. Keputusan Rektor Unmul No. 011 / UN17.15 / KP / 2023. Oleh Rektor Unmul Abdunnur diserahkan pada Jumat, 27 Januari 2023 lalu. Lembaga yang berfungsi untuk meningkatkan penerimaan dana Unmul di luar dari UKT.

Makanya fokus usaha kami sebenarnya, sih, belum jauh sampai di pengembangan usaha akademik. Seperti meningkatkan penerimaan dosen. Jadi sebagian besar dari usaha-usaha kami itu non-akademik yang kita kembangkan, terutama di bidang aset.

Jadi memang BPU ini, kan, semacam lembaga yang kalau di ranah pemerintahan itu bisa dibidang mirip seperti BUMN. Itu, kan, modalnya dari negara. Kalau kami modalnya dari kampus.

Bidang usaha di Unmul yang sudah berjalan?

Pertama ada kantin. Kantin di seluruh fakultas idealnya dikelola secara terpusat oleh BPU

Unmul. Namun, sampai saat ini belum semua kantin berkoordinasi dengan BPU. Itu masih jadi kendala bagi kami.

Nantinya dana yang masuk itu akan dikelola ke rekening rektorat. Itu juga ada SK Rektor-nya. SK Rektor Tentang Tarif Sewa Lahan Jenis Usaha Kantin, Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Fotokopi/ATK, SK Nomor 1138/UN/17/HK/02.03/2023.

Kami juga berharap bagaimana kantin menghadirkan pelayanan yang menarik mahasiswa. Menyajikan makanan yang enak dan sehat, juga tempat yang nyaman. Agar mahasiswa lebih memilih berbelanja di dalam kampus dibandingkan di luar kampus. Agar perputaran ekonomi banyak terjadi di dalam kampus.

Ke depan kita akan dorong dan maksimalkan lagi. Pengelolaan ini termasuk juga PKL dan Fotokopi. Kemudian, yang kedua ada asrama. Unmul punya dua aset asrama alias Rumah Susun Mahasiswa (Rusunawa) yang dikelola oleh BPU. Satu letaknya di Jl. Ki Hajar Dewantara, sementara satu lagi di dekat FH. Setiap tahunnya selalu penuh, pergantian mahasiswa selalu ada. Jadi itu yang termasuk berjalan.

Selain itu ada juga penjualan baju hitam putih untuk mahasiswa baru. Namun, usaha ini masih belum berjalan maksimal. Karena banyak ketidaktahuan warga Unmul mengenai BPU. Jadi kami dikiranya jualan pribadi, padahal enggak. Kami berjualan untuk kembali ke kampus. Hasilnya dikelola lagi oleh kampus.

Lanjut lagi ada U-Mart. Memang dibangun dalam rangka meningkatkan perekonomian universitas. Jadi ini semacam gerai atau minimarket yang menawarkan berbagai produk olahan makanan hingga barang kebutuhan mahasiswa. Sudah ada sejak 2021.

Sejauh ini, kan, kami kerja sama dengan Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Unmul, ya. Namun, progresnya tidak menunjukkan *traffic* yang bagus

dari sisi keuangan. Jadi nanti kami akan komunikasi dengan pengelola. Akan kami evaluasi juga terkait kelanjutan dari U-Mart ini.

BPU Unmul juga punya usaha di bidang penyewaan baju toga dan foto studio. Ini untuk mahasiswa yang wisuda. Jadi segmennya sudah jelas dan lebih spesifik.

Kami bekerja sama dengan pihak foto studio dari luar. Mereka yang memotret mahasiswa saat momen diwisuda oleh Rektor Unmul, kemudianambilnya di studio. Kedepannya bisnis ini juga akan diperluas.

Kemudian setiap ada *event*, misalnya saja wisuda. Kan, ada banyak *stand*. Nah, itu juga jadi pengelolaan BPU. Ada potensi uang juga di sana, termasuk lumayan. Jadi sistemnya sewa lahan. Cuman, kan, dua tahun pandemi tidak pernah ada wisuda *offline*, makanya baru jalan lagi itu 2023, gitu.

Kami juga mau kembangkan dengan momen wisuda. Kan, di Unmul ada 4 kali wisuda dan ada 4 kali yudisium. Itu juga potensinya bagus sekali. Siapa, sih, yang enggak mau mengabadikan momennya. Kan, beda tuh foto di kamera sama foto di *handphone*. Apalagi studio foto pasti penuh. Jadi kami kasih alternatif. Kedepan akan seperti itu.

Apa rencana bisnis BPU Unmul dalam jangka panjang untuk Unmul PTN-BH?

U-Mart dievaluasi, Indomaret masuk rencana.

Kami berencana membangun Indomaret di dalam kampus. Ini akan terpisah dengan U-Mart. Jadi di luar dari U-Mart. Kita bermitra dengan Indomaret pusat. Nanti rencananya akan dibangun di GOR-27. Ini masih dalam proses administrasi, dalam tahap pengajuan.

Unmul bakal punya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)

Kami bakal bangun SPBU di dalam kampus. Sistemnya kerja sama dengan perusahaan daerah. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak Pertamina. Kami sudah dapat rekomendasi gubernur juga. Saat ini tinggal menunggu vendornya saja.

Opsi lokasi ada dua, yakni di GOR-27 atau di sekitar gerbang M. Yamin. Nanti terserah Pertamina paling pas di mana. Karena, kan, ada persyaratan luas lahannya. Jadi kami ikuti. SPBU ini untuk umum.

Potensi SPBU menambah kemacetan di Unmul

Itu nanti akan dikaji oleh vendor. Kalau jadi di GOR-27, jelas pengurangan lahan pasti ada. Rencananya tahun depan mulai dibangun. Ya

semoga tahun depan bisa beroperasi juga. Kalau estimasi dari vendor itu bulan Oktober tahun depan sudah beroperasi.

GOR-27 bakal jadi pusat kegiatan dan ekonomi mahasiswa

Selain Indomaret, jika SPBU realisasinya jadi di GOR-27, di sana akan jadi pusat kegiatan dan ekonomi mahasiswa. Jadi memang keinginan kami dan Pak Rektor kita yang baru ini, GOR ini dijadikan



Husni Thamrin
Kepala BPU

pusat kegiatan. Enggak hanya ramai ketika ada event saja. Kan, itu nanti bakal hidup banget kalau SPBU ada di sana.

Kemudian kantor-kantor perbankan juga ingin kami jadikan satu di GOR-27. Beberapa bank yang sudah bermitra ada BNI, Kaltimara, BTN, BRI, BSI, Muamalat. Nah, itu kalau mereka ingin buka kantor atau perkantoran bank ada di GOR-27, hasil sewanya kan juga lumayan.

Lalu muncul ide GOR Unmul mau dijadikan kawasan kuliner dan bisnis, lah, di situ. Berarti bakal ada UMKM juga di situ. Malah kemarin kita pengen ada bazar, konsepnya seperti di GOR Kadrie Oening. Jadi wisata belanja.

Sebenarnya Pak Rektor malah penginnya ada *event* mingguan, ada banyak *stand* makanan. Bisa juga misalnya Pak Rektor ngeluangin waktu buat senam bersama atau jalan santai. Jadi GOR-27 bakal hidup banget.

Unmul mau membangun tower asrama mahasiswa baru

Kami juga ingin membangun *tower* untuk mahasiswa baru. Doakan saja di periode Rektor Abdunnur saat ini terealisasi. Modelnya gedung tinggi seperti apartemen.

Mudah-mudahan di tahun depan sudah mulai dibangun. Infonya ada investor yang mau bangun. Lalu nanti kemungkinan kami prioritaskan mahasiswa dari luar dulu. Juga mahasiswa baru wajib satu tahun asrama. Supaya nanti sesuai visi-misi rektor agar kampus ini mahasiswanya berwawasan kebangsaan.

Rencananya akan dibangun di belakang gedung FKM. Masih ada lahan yang kosong di situ. Nanti asrama di sana kami akan batasi supaya bergantian sama mahasiswa baru. Kalau misalkan buka dengan kapasitas 5000 mahasiswa, nah, setelah satu tahun mereka akan terpecah ke Indekos Pramuka dan sekitarnya.

Saat ini tahapnya masih administratif. Sudah ada investor, tapi masih perlu tambahan lagi. Minimal dua investor lagi. Itu omzetnya lumayan nanti.

Unmul akan perbaiki Guest House

Guest House juga akan kami perbaiki. Belum tau pengerjaannya kapan, tetapi saat ini sudah ada vendornya yang mau berinvestasi. Mereka belum lama ini melakukan survei lokasi.

Karena, kan, sudah enggak layak banget itu. Tidak dialihfungsikan, tetapi diperbaiki dan jadi *Guest House* yang lebih bagus.

Guest House ini untuk umum, untuk orang tua, tamu wisuda, tamu-tamu dari luar negeri yang datang ke Unmul bisa menggunakan itu.

Seperti kemarin, ada pertukaran mahasiswa. Ada mahasiswa dari Philipina, Malaysia, Brunei Darussalam. Daripada bingung tinggal di mana, kita perbagus *Guest House* kami.

Kasihlah orang yang datang ke Unmul, kampusnya kok besar banget tapi tempat nginepnya enggak ada.

Unmul akan buka bisnis sewa mini soccer

Lapangan bola bakal jadi *mini soccer*, kami pengen nanti di sana kerja sama dengan Borneo FC. Sembari kegiatan mahasiswa jalan, nanti bisnisnya juga jalan.

Akan dibuka untuk umum berbayar. Namun, nanti khusus mahasiswa, kita kasih jam untuk latihan sendiri dan gratis. Termasuk Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) olahraga, kan, wajib berlatih. Apalagi setiap tahun ada *event*, jadi sekaligus. Namun, untuk klub-klub bola gabungan gitu bisa bayar.

Sebenarnya saat ini sudah berproses, ya. Makanya saat ini ditutup. Ini lapangan yang ada di dekat gerbang M. Yamin. Untuk fasilitas olahraga di

sekitar GOR-27, rencana belum sampai sana, tetapi area itu juga pasti akan kami perbaiki dan kelola.

Tahun ini banyak rencana dan proses administrasi

Masih dalam proses administrasi semua. Sembari semua proses berjalan dan menunggu, kami juga tetap memberi perhatian pada bisnis internal seperti kantin tadi.

Perkiraan pada 2024 akan banyak tampak pembangunan. Kemudian kalau semuanya by progres ya, sesuai rencana insya Allah 2025 sudah bisa mulai semua.

Perkiraan omzet yang sudah ada dan perkiraan omzet jangka panjang

Untuk kantin sendiri bisa mencapai angka Rp1 miliar. Untuk Rusunawa bisa sampai Rp200 juta. Secara keseluruhan yang sedang berjalan bisa saja mencapai Rp2 miliar sampai Rp3 miliar per tahun.

Kalau semua rencana sudah terealisasi, bisa saja omzet mencapai Rp100 miliar. Harapannya per tahun bisa semakin meningkat. Bahkan bisa tembus triliunan. Cukup untuk membiayai kampus Unmul secara mandiri sebagai PTN-BH.

Memungkinkan kami dapat omzet yang sangat besar. Apalagi kalau semua jalan. Ada SPBU, Tower Asrama, Itu bisnis dengan omzet fantastis. Ditambah di Samarinda cari hunian bintang lima ke atas itu sudah lumayan susah.

Jadi Unmul punya banyak peluang usaha, enggak cuman untuk mahasiswa, tetapi menyasar ke luar juga.

Harapan BPU Unmul kedepannya?

Untuk seluruh sektor bisnis di Unmul untuk terus meningkatkan kualitasnya. Kalau kantin, ya, dari segi kenyamanan, harga, dan kualitas makanan. Juga memperbagus *marketing* agar mahasiswa senang datang ke kantin sendiri.

Kemudian harapannya untuk mahasiswa juga, makanlah di kantin kampus sendiri. Untuk menghidupi perekonomian kampus juga.

Mudah-mudahan bisa berjalan dan semuanya bisa kita lewati. Unmul juga bisa menghidupkan ekonomi kampus melalui BPU. Sebenarnya poinnya harus semua elemen, enggak bisa hanya saya dan staf-staf BPU saja. Harus semua elemen di Unmul ini sadar, bahwa BPU atau unit bisnis kita ini bisa hidup kalau semuanya sadar untuk menghidupkan, itu saja.

Optimis BPU bisa menyokong Unmul jadi PTN-BH?

Optimis, lah. Harus, kalau enggak optimis untuk apa saya di sini. Kalau saya enggak optimis saya enggak berani di sini, gitu, kan. Harus optimis lah.

Unmul siap untuk menjadi PTN-BH. Dengan segala persiapannya ini, ya, Insya Allah siap. Optimis, lah. Mahasiswa juga harus optimis.

Tim Liputan: Khoirun Nisa, Disthia Nur Maharani, Lauransia Soraida Alvis

Editor: Efrianti Muhnizar Sari



Di Antara Bayang-bayang Organisasi dan Perkuliahan: Menilik Hustle Culture di Lingkup

Apakah kamu sering merasa kalau waktu 24 jam itu kurang? Atau kamu senang bekerja sampai sering lupa dengan diri sendiri? Jika iya, mungkin kamu sudah termasuk orang yang menerapkan *hustle culture*. Secara etimologis, *hustle culture* berasal dari dua kata dalam Bahasa Inggris yaitu *hustle* yang memiliki arti aksi energik atau mendorong seseorang agar bisa bergerak lebih cepat secara agresif. Kemudian, *culture* yang memiliki arti budaya.

Para ahli turut memiliki definisi *hustle culture*. Salah satunya berasal dari pakar Psikologi yang menyebut bahwa *hustle culture* merupakan budaya yang membuat seseorang menganut *workaholism* atau gila kerja (Setyawati, 2020).

Hustle culture awalnya berada di dunia kerja saja, tetapi belakangan ini sudah menjangkiti mahasiswa terutama yang aktif dalam kegiatan berorganisasi. Perilaku *hustle culture* ini dapat dilihat dari

banyaknya keluhan anggota organisasi yang menilai bahwa berbagai kegiatan yang sedang berjalan sangat berat dan padat. Sehingga tak sedikit dari mereka rela menghabiskan waktu luangnya untuk tetap menjalankan kegiatan organisasi tersebut.

Perjuangan Viony Lepas dari Jeratan Hustle Culture

Sketsa berkesempatan melakukan wawancara dengan Agnes Viony, mahasiswi Ilmu Komunikasi 2021 sekaligus Wakil I Putri Kampus Unmul pada Rabu (4/10) lalu. Dikelilingi oleh orang-orang yang ia anggap memiliki prestasi lebih darinya, membuat Viony mengejar rasa ketertinggalannya dengan mendorong dirinya sekeras mungkin.

Viony sempat mengikuti berbagai macam organisasi seperti Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi (Himaksi), Indonesian Youth Diplomacy (IYD), dan Fisipers. Tidak hanya itu, ia juga aktif dalam kegiatan lainnya seperti Duta



Agnes Viony

Mahasiswi Ilmu
Komunikasi 2021

Bahasa Kaltim-Tara dan juga kompetisi Putra-Putri Kampus.

Namun, pada akhirnya ia mengakui bahwa hal yang dilakukannya sempat menguras dirinya secara fisik maupun mental. Ia pun kemudian menyadari bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari apa yang dicapainya.

“Kalau gagal, aku mikirnya enggak akan dianggap sebagai apa-apa. Namun, makin ke sini aku makin sadar kalau ternyata *value*-ku lebih dari apa kata orang. Jadi, *value*-ku bukan dinilai dari kegagalan atau keberhasilanku saja,” ujar Wakil Putri Kampus 1 ini.

Dari beberapa organisasi yang dijalaninya, Viony memutuskan untuk menyudahi kiprahnya di salah satu organisasi tersebut meski belum genap satu periode kepengurusan.

“Aku merasa enggak cocok sama lingkungannya, enggak cocok sama cara anggota-anggota itu berinteraksi satu sama lain, dari budaya organisasinya juga. Kadang banyak, kan, organisasi yang kalau misalnya mau buat kegiatan, rapatnya sampai tengah malam gitu,” ucapnya.

Menurut Viony, *hustle culture* sangat terasa di salah satu organisasi yang menaunginya. Kegiatan yang berlarut-berlarut dengan kesibukan sangat sulit untuk diimbangi dengan dunia akademik. Ia melihat efek yang signifikan bagi teman-temannya yang masih berkecimpung aktif di dalamnya. Mereka yang awalnya berkuliah secara rutin, perlahan-lahan mulai terganggu secara akademik. Viony merasa bahwa keputusannya untuk keluar adalah pilihan yang tepat.

Tak ketinggalan, Viony turut menyampaikan kiprahnya di organisasi lain. Khususnya di IYD, ia merasa bahwa IYD adalah tempat yang tepat untuk

mengembangkan dirinya. Tak dimungkiri kegiatan yang padat turut menghampirinya, namun ia merasa bahwa apa yang dikerjakannya bermakna sekaligus produktif.

Cara Agung Menyeimbangkan Akademik dengan Tiga Organisasi

Lain Viony, Lain pula Agung. Mahasiswa yang tergabung dalam tiga organisasi yaitu Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (Himip) sebagai anggota Departemen Kajian Keilmuan, Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Kajian dan Pemberdayaan Masyarakat (KPM), serta Keluarga Mahasiswa KIP-Kuliah (Gamakipka) menampik jika dirinya terjebak dalam *hustle culture*.

Dengan tergabung dalam tiga organisasi, Agung tetap bisa menyeimbangkan dan memprioritaskan akademiknya. Namun, ia menyadari jika tak sedikit orang-orang di lingkungannya kerap menerapkan budaya tersebut..

“Saya rela mengorbankan waktu di kedua organisasi (Himip dan UKM KPM) ini tadi, tetapi saya tentu lebih memprioritaskan kuliah saya. Jika ada tugas atau ada kesibukan yang berkaitan dengan kuliah, tentu saja saya akan memprioritaskan hal tersebut,” jelasnya ketika diwawancarai oleh *Sketsa* pada Sabtu (2/9).

Di tengah kesibukannya sebagai mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Agung tetap mencoba menyisihkan waktu luangnya untuk tetap berpartisipasi dalam ketiga organisasi tersebut. Menyoal kendaraan pribadi dan jarak indekos yang cukup jauh diakui Agung cukup menjadi kendala baginya. Meski begitu, hal tersebut tak lantas menyurutkan semangat Agung untuk tetap berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan organisasinya.



Agung Juniarto

**Mahasiswa Ilmu Pemerintahan
Angkatan 2022**

“Saya hanya mengikuti kegiatan yang sekiranya benar-benar bisa saya ikuti, dan itu kalau tidak bertabrakan dengan jadwal Himpunan atau UKM, tidak bertabrakan pula dengan jadwal tugas,” ungkapnya.

Tak kalah penting, selain membagi waktunya untuk organisasi dan kuliah, Agung turut menyisihkan waktu bagi dirinya sendiri.

“*Mental health* dan kesehatan fisik, ya, aman. Tentu kita barengi juga dengan yang namanya olahraga. Jadi, jangan mentang-mentang kita sibuk dengan kegiatan organisasi, kita sampai lupa menjaga kesehatan.”

Walau tidak menerapkan *hustle culture*, Agung berpandangan bahwa *hustle culture* memiliki sisi positif. Namun, ia juga tidak menafikkan kalau *hustle culture* turut memiliki dampak yang negatif, terutama bagi kesehatan mental dan fisik. Bahkan, turut berdampak ke sisi akademik seperti yang terjadi pada beberapa temannya.

“Dari sisi positif, misalnya ada tugas maupun ada keperluan yang semestinya diselesaikan dengan cepat, jika kita menerapkan budaya *hustle culture*, kan, tentu akan lebih cepat selesai,” sebutnya.

Mengintip Kiat Berorganisasi dengan Sehat Ala Adjirin

Adjirin, Ketua Lembaga *Asian Law Student Association* (ALSA) turut membagikan pengalamannya kepada *Sketsa* pada Kamis (5/10). Dirinya mengaku bahwa ia merasa *relate* dengan *hustle culture* karena menerapkan budaya tersebut dan bahkan menganggapnya sebagai gaya hidup.

“Karena bagi saya, *hustle culture* adalah gaya hidup yang memang dipakai oleh orang-orang yang sangat oportunis. Dalam artian mereka punya

target, mereka punya banyak sekali angan-angan yang ingin dicapai, dan yang seperti itu adalah orang yang memang sangat cepat dalam beradaptasi.”

Bagi Adjirin, orang-orang yang menerapkan *hustle culture* punya kecenderungan untuk memiliki *growth mindset* karena dituntut untuk kompeten dan terlibat dimana pun mereka berada. Namun, Adjirin sepakat bahwa *hustle culture* turut memiliki dampak negatif, seperti fokus dan kapasitas yang selalu terbagi karena memiliki banyak tujuan yang ingin cepat dicapai.

Adjirin pun merasa kalau organisasi yang ia pimpin menerapkan budaya *hustle culture* sebab memiliki sederet program kerja dan kegiatan. Kendati demikian, hasil survei yang dilakukan oleh internal ALSA menunjukkan bahwa anggota organisasi tersebut merasa senang dengan kegiatan yang dijalankan.

“Menurut survei selama di rekapan internal dari Sumber Daya Manusia (SDM), mereka (anggota ALSA) justru senang. Karena apa yang mereka kerjakan, tuh, *worth the price*. Apa yang mereka hasilkan, apa yang mereka dinamikakan sebelumnya itu bakal berdampak ke mereka juga sebagai *self growth*-nya mereka selama di organisasi,” jelas Adjirin.

Sebagai *Local Chapters*, ALSA memiliki tak kurang dari 100 program kerja yang harus dituntaskan. Adjirin mencatat, seluruh program kerja yang dicanangkan seyogianya tidak boleh mengganggu kehidupan para anggotanya baik secara mental, fisik, hingga akademik.

“Tidak boleh meninggalkan kewajiban kita sebagai mahasiswa untuk tetap berkuliah maupun aktif dalam pendidikan kita,” pesan Adjirin.



Muhammad Adjirin

Ketua ALSA LC Unmul

Perspektif Psikologi Memandang Hustle Culture

Dian Dwi Nur Rahmah, Dosen Prodi Psikologi Unmul mengatakan bahwa seorang mahasiswa sejatinya tak bisa lepas dari aktivitas di luar pembelajaran kampus. Sebab, mereka akan terus mencari pengalaman, mengasah kemampuan, serta menyiapkan diri untuk terjun ke dunia profesional.

Dian pun menyebut bahwa mahasiswa yang menggabungkan diri dengan banyak organisasi masih banyak ditemukan di lingkungan kampus. Mereka inilah yang sangat dekat dengan *hustle culture*.

Satu hal yang tidak dapat dihindari oleh kebanyakan mahasiswa karena *hustle culture* adalah *burnout*. *Burnout* sendiri merupakan kondisi stres kronis di mana pekerja merasa lelah secara fisik, mental, dan emosional akibat pekerjaan. Kondisi ini pula yang sering dialami mahasiswa yang aktif di berbagai kegiatan. Dampaknya, kondisi ini dapat mengancam turunnya performa akademik seorang mahasiswa.

"Ada mahasiswa yang senang banget ikut banyak kegiatan, akhirnya terjebak dalam situasi di mana mereka capek dan lelah bekerja. Akhirnya *burnout* yang didapat dari stres ini yang tidak dikelola dengan baik," terangnya ketika diwawancarai oleh *Sketsa* pada Senin (9/10).

Oleh karena itu, Dian menegaskan bahwa seorang mahasiswa sudah sepatutnya meletakkan kehidupan akademik sebagai prioritas. Meski aktif di berbagai organisasi, hal itu tidak bisa menjadi alasan bagi seorang mahasiswa dalam mengesampingkan kewajiban perkuliahannya.

Menurut Dian, idealnya kehidupan berorganisasi harus berjalan beriringan dengan performa akademik, sehingga akan menciptakan keseimbangan. Namun, berbagai faktor yang

menjadi hambatan membuat hal ini lantas bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan.

"Memang ini idealnya, tetapi kenyataannya memang akan terasa sulit. Karena kita terjebak dengan budaya di mana kita harus banyak beraktivitas. Kesannya kalau kita memiliki banyak aktivitas di mana-mana, tuh, kayaknya keren gitu."

Agar tak terjebak dalam *hustle culture*, Dian juga menuturkan bahwa mahasiswa harus pandai memilah organisasi yang diikutinya. Dirinya menekankan jangan sampai mahasiswa mengikuti banyak organisasi hanya sekadar untuk mendapatkan embel-embel mahasiswa aktif.

"Jangan sampai karena haus akan pengakuan, haus dengan validasi orang. Jangan sampai karena itu kita terjebak dalam *hustle culture* ini," tegasnya.

Dian pun turut menyoroti fenomena mahasiswa yang kerap mengutamakan organisasi berujung pada anjloknya Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Menurutnya, hal ini tak bisa disepelekan lantaran akan menjadi celah tersendiri saat melamar kerja.

"Pada akhirnya, IPK juga yang dipandang oleh calon *user* kita. Enggak bisa dipungkiri kalau *insight* pertama itu dari IPK. Kalau misal IPK-nya jatuh, terus bilang 'saya lama pak di organisasi'. Akhirnya justru ada pandangan kalau semasa kuliah dulu enggak bisa menentukan prioritas, terlena dengan sesuatu, dan akhirnya lupa dengan kewajiban."

Perihal peran Unmul dalam mengatasi *hustle culture*, Dian mengaku pihak universitas tidak terlalu mengatur detail soal ini. Mengingat hal ini merupakan permasalahan pribadi mahasiswa. Namun, ia mengatakan bahwa organisasi seharusnya bisa menghentikan kegiatannya selama masa-masa UTS dan UAS, agar semua mahasiswa



Dian Dwi Rahmah

Dosen Psikologi Unmul

dapat fokus belajar ujian tanpa memikirkan tanggung jawab di organisasi.

Terakhir, Dian berpesan agar mahasiswa ke depannya tak hanya sekadar berorasi, tetapi juga berinovasi.

“Harusnya mahasiswa tunjukkan dengan inovasi, dengan karya, bukan dengan orasi. Namun, dengan kolaborasi, literasi, diskusi yang bisa sampai diliput media,” tutupnya.

Tim Liputan: Marcello Ahimsa Hayamaputra, Muhammad Rayyan Ramadhan, Rafika Widyanasari, Feby Febriana Hidayat, Muhammad Luthfi Nauval Nur Orfakha.

Editor: Efrianti Muhnizar Sari, Nindiani Kharimah

Potensi Lame Duck Rencana PTN BH Unmul

Universitas Mulawarman (Unmul) sepertinya mesti banyak bercermin. Baik itu cermin ke dalam (historis), maupun cermin ke luar (komparatif). Belakangan obrolan mengenai rencana perubahan status Unmul dari Badan Layanan Umum (BLU) ke Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH) semakin mencuat meski terdengar sayup-sayup. Barangkali sedikit malu-malu. Atau, bahkan ragu-ragu. Dari rencana perubahan status inilah mengapa Unmul perlu bercermin.

Mampukah? Jika tidak, kenapa mesti mau?

Cermin ke dalam yang bersifat historis mesti berkaca dua hingga tiga tahun lalu di masa pandemi. Di masa itu kas Unmul tekor banyak. Artinya, daya bayar mahasiswa Unmul, termasuk lemah dan rentan. Itu saja, Unmul masih BLU dimana subsidi negara masih tinggi. Bagaimana kalau sudah PTN BH yang tanggung jawab negaranya makin tipis? Boleh jadi, Unmul makin tekor dan mahasiswa terusir dari haknya mendapatkan pendidikan tinggi karena persoalan biaya yang semakin mencekik.

Cermin keluar ialah yang bersifat komparatif. Coba tengok kampus-kampus di Jawa dan terutama di luar Jawa yang sudah kepalang basah menjadi PTN-BH. Apakah kesiapan

infrastruktur, manajemen aset, dan kualitas sumber daya Unmul sesiap mereka? Jika ya, dari aspek apa saja? Jika tidak, kenapa harus ikut-ikutan menempuh jalan itu (PTN BH)?

Pendeknya, sudah siap dan mampukah Unmul mencari uang sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya?

Kalau tidak, jangan-jangan pada akhirnya kantong mahasiswa juga yang akan diperasnya, dan upah dosen serta tendik (tenaga pendidik) juga yang bakal diirisnya. Jika sudah begitu, metafor *bebek pincang* (*lame duck*) bakal menimpa Unmul. Jalan pincang dan tertatih-tatih karena belum mampu berjalan

dengan dua kaki secara sempurna.

Serius mau dan mampu mandiri?

Berubah status tak semudah membalik telapak tangan. Itu sudah pasti. Pertanyaan yang mesti dijawab ialah seberapa mau dan mampukah Unmul?

Kemauan untuk menjadi PTN BH tentu boleh beralasan subjektif, bahwa kita mau seperti PTN lain yang sudah dinilai “maju”. Namun, kemampuan mensyaratkan kondisi objektif. Memang benar bahwa ada indikator dari Dikti (Pendidikan Tinggi) tentang poin kemampuan



suatu Universitas untuk menjadi PTN BH. Namun, indikator tersebut lebih bersifat kuantitatif. Unmul perlu berkaca ke dalam untuk menilai kemampuan secara kualitatif.

Seberapa siap dan seberapa mampu untuk berdiri di atas sumber rekening sendiri tanpa asupan dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara)?



Kemampuan secara kuantitatif dan kualitatif adalah penting. Bukan apa apa, berkaca dengan kampus-kampus yang sudah duluan PTN BH, mereka kasarnya dituntut untuk mampu “menjual diri” ke luar. Kerjasama adalah salah satu jalan yang sering menjadi kunci penghasilan. Selebihnya adalah investasi dari pihak swasta yang berminat.

Paling sering untuk mencari duit bagi kampus PTN BH adalah praktik “spasialisasi”. Yaitu, dengan mengkomersilkan ruang-ruang di Universitas untuk menjadi papan iklan perusahaan-perusahaan yang berniat memasang iklan atau mendirikan gerai.

Itulah wajah kampus yang belakangan memilih jalan PTN BH. Konsep marketing alias cara “menjual diri” harus pandai-pandai untuk mengisi pundi-pundi.

Perubahan itu mesti terjadi begitu cepat, kalau tidak, perubahan dari BLU ke PTN BH hanya

sekedar ganti bingkai belaka tanpa perubahan substansial.

Menguras mahasiswa menghisap Dosen dan Tendik

Ketidakmampuan secara mandiri dalam mengisi rekening sendiri bisa berakibat fatal bagi kampus yang sudah “terjebak” berubah menjadi PTN BH. Jika gagal cari uang sendiri, cara paling mudah biasanya adalah menaikkan UKT Mahasiswa dan boleh jadi iuran-iuran lain, yang berarti UKT tidak lagi “tunggal”. Jika begitu, mahasiswa kembali akan menjadi “tumbal” pertama PTN BH.

Selain itu, jalan lain adalah menekan pengeluaran, dimana cara paling mudah adalah memotong upah dan tunjangan dosen dan tendik atau biaya operasional lainnya. Dengan begitu, dosen dan tendik pun akan keserempet getahnya.

Jika ditelisik dan diintip-intip, PTN BH akan memberikan dampak yang bersifat struktural. Artinya, pihak yang berada pada piramida paling bawah, yaitu mahasiswa akan mendapatkan dampak yang paling besar. Setelah itu, tendik sebagai pekerja administratif. Lalu, dosen sebagai pekerja akademik. Di piramida paling tinggi, pejabat kampus akan merasakan dampak yang terkecil. Olehnya itu, konsekuensi paling logis nantinya adalah para dosen dan tendik akan berlomba-lomba menjadi pejabat kampus.

Jika para sivitas akademika berlomba-lomba menjadi pejabat, apa kabar Tri Dharma Perguruan Tinggi: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian? Akankah hanya sekedar slogan dan papan nama yang tak lagi bermakna dan kehilangan substansi?

Transformasi mental “penghabis anggaran” ke “penghasil uang”?

PTN BH sudah dikatakan di atas bahwa tidak hanya sekedar berganti nama dan status. Ada perubahan substansial yang disyaratkan berubah

terutama mengenai hal mendasar karena menyangkut dapur rumah tangga universitas. Ibarat keluarga, universitas diminta untuk mengatur keuangannya sendiri dari mulai pendapatan hingga pengeluaran.

Syukur-syukur jika upaya efisiensi bisa dipraktikkan. Salah satunya ialah dengan mengurangi biaya “jalan-jalan” pejabat kampus dan biaya “rapat ke luar kota” alias SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) para pejabat universitas. Artinya, mental dan perilaku kebiasaan “menghabiskan” anggaran mesti berganti menjadi “menghasilkan” anggaran. Pejabat-pejabat PTN BH mesti punya otak “bisnis” untuk mengisi pundi-pundi universitas. Sayangnya, jika itu terpenuhi, bagaimana dengan otak “akademis” dan jiwa “intelektualisme”? Boleh terjadi disorientasi.

Efisiensi dan pengetatan anggaran adalah jalan lain yang boleh jadi pilihan. Kebiasaan menghabiskan anggaran atau mengejar serapan anggaran perlu mengalami perubahan. Apatah lagi, jika akhir tahun yang biasanya kegiatan menumpuk dengan alasan “menghabiskan anggaran”, sementara terdapat deretan mahasiswa antri mengurus surat “tunda bayar UKT” akibat tak mampu melunasi UKT. Ironis bukan?

Catatan Kritis

Sivitas akademika Unmul layak melibatkan diri dan dilibatkan dalam menyiapkan masa depan salah satu universitas terbaik dan terbesar di pulau Kalimantan ini. Termasuk dan terutama ketika jebakan neoliberal di dunia pendidikan tinggi melalui PTN BH sebagai hasil deregulasi bernama UU PT (Undang-Undang Pendidikan Tinggi) No.12 tahun 2012 berusaha “dicangkokkan” di Bumi Etam.

Unmul tentu tidak ingin menjadi *lame duck* (bebek pincang), bukan? Jika iya, perlu menghitung dan sadar diri betul sebelum “memilih jalan itu”.

Opini ditulis oleh Nasrullah, Dosen Prodi Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman.



Kesempatan atau Ancaman? Kehadiran Chat GPT bagi Dunia Akademis: Dari Efisiensi Hingga Potensi Minim Kritis

Dalam era digital yang terus berkembang, peran sistem kecerdasan buatan AI (*Artificial Intelligence*) semakin mendominasi dunia akademik. Salah satu inovasi terkini yang mencuri perhatian para peneliti dan akademisi adalah perkembangan chatbot canggih, khususnya model GPT (*Generative Pre-trained Transformer*).

ChatGPT telah menjadi mitra praktis bagi para ilmuwan dan pendidik, memungkinkan mereka untuk menjelajahi berbagai aspek ilmu pengetahuan dengan cara yang lebih inovatif dan efisien. Dari penelitian bahasa alami hingga pengolahan data, GPT membantu menyederhanakan tugas-tugas yang sebelumnya memakan waktu dalam dunia akademik.

Di kalangan mahasiswa penggunaan teknologi asisten daring tersebut tak sedikit digunakan dalam membantu menyelesaikan pekerjaan mereka. Mulai dari membantu menjawab tugas-tugas kuliah hingga sekadar untuk berselancar mencari informasi yang ingin diketahui.

ChatGPT di tengah dunia perkuliahan

ChatGPT memberikan segudang kemudahan bagi mahasiswa yang menggunakannya. Dengan kemudahan yang ditawarkannya, seorang mahasiswa yang sedang kebingungan tinggal memasuki sebutir pertanyaan kepada ChatGPT dan dalam waktu sekejap, permasalahan yang dialami hilang begitu saja.

Pendapat serupa disampaikan oleh Muhammad Daffa Nasywan (4/10), mahasiswa Psikologi angkatan 2022 dan juga Abdul Fattah, mahasiswa Ilmu Hukum 2021 yang ditemui Sketsa beberapa waktu lalu. Keduanya setuju bahwa adanya ChatGPT mampu memudahkan kehidupan mahasiswa sebagai akibat dari kemudahan untuk mengakses dan menggunakannya.

“Kalau mengikuti perkembangan zaman, ChatGPT itu sangat penting karena kalau kita lihat kemajuan teknologi juga semakin berkembang pesat. Jadinya, kalau ada AI (ChatGPT) lebih membantu apalagi di bidang-bidang seperti teknik misalnya *coding*” Jelas Fattah yang diwawancarai Sketsa pada (3/10) lalu.

Meski dengan kemudahan yang begitu banyak disediakan oleh Chat GPT di masa akademik zaman sekarang, salah satu teknologi canggih tersebut masih banyak menjadi keresahan bagi segelintir orang. Dalam survei yang dihimpun Sketsa beberapa waktu lalu mencatat dari 200 responden yang berasal dari berbagai fakultas. Terdapat 26% diantaranya tidak setuju akan pemanfaatan Chat GPT pada cakupan perkuliahan.

Alasan yang paling dipertimbangkan dalam ketidaksetujuan tersebut yaitu berkurangnya kemampuan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis karena jawaban yang didapatkan cenderung langsung didapatkan tanpa proses pemikiran individu mahasiswa.

Andini Oktaviandari, seorang mahasiswi Sastra Indonesia turut menyampaikan kerisauannya kepada Sketsa (5/10). ChatGPT yang menyajikan informasi tanpa adanya referensi tidak layak digunakan dalam konteks akademis. Tak jarang ia menemukan hasil pekerjaan kelompok yang tidak

mempunyai sumber sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

“Itu (penggunaan Chat GPT) menyebalkan banget sih, kayak kita sudah capek-capek di sini (mencari jawaban resmi) terus ada yang tiba-tiba datang langsung *“ini nih jawabannya”*. Pas dilihat-lihat ternyata dari ChatGPT terus sumbernya nggak ada, itu menyulitkan banget.” Ujar Andini.

Andini, Daffa, dan Fattah setuju bahwa kehadiran teknologi AI ini cukup membantu dalam perkuliahan. Kekhawatiran yang muncul adalah bagaimana teknologi ini “memanjakan” para mahasiswa karena sifatnya yang instan dan tidak melatih kemampuan berpikir mahasiswa serta meningkat kemalasan mahasiswa.



“Minusnya juga mahasiswa jadi malas membaca ke hal-hal yang lebih luas karena maunya dapat jawaban pokok dari Chat GPT secara instan tanpa tahu rincian-rincian yang lain.” Sebut Fattah.

Andini dan Daffa sepakat bahwa ChatGPT sebaiknya tidak dijadikan sebagai jalan utama dalam menyelesaikan perkuliahan. Andini mengungkapkan bahwa usaha-usaha lain mesti ditempuh sebelum menggunakan ChatGPT. Salah satunya adalah dengan berdiskusi dengan dosen terakit. Cukup menjadikan ChatGPT sebagai salah satu wadah belajar dari sekian ruang informasi namun tidak 100% mengandalkannya.

“ChatGPT itu boleh dipake tapi jangan sebagai acuan kita buat nyari ilmu gitu, karna nyari ilmu itu bisa dimana aja gak harus tergantung sama ChatGPT, jadi kita harus belajar, mulai belajar” ujar Daffa.

Teknologi AI di mata ahli

Merasa kemajuan teknologi yang memegang fungsi yang begitu banyak bagi kehidupan, Hamdani selaku kepala Unit Pelayanan Terpadu Teknologi Informasi dan Komunikasi (UPT TIK) Unmul mengaku Chat GPT memang membantu mahasiswa termasuk juga dosen.

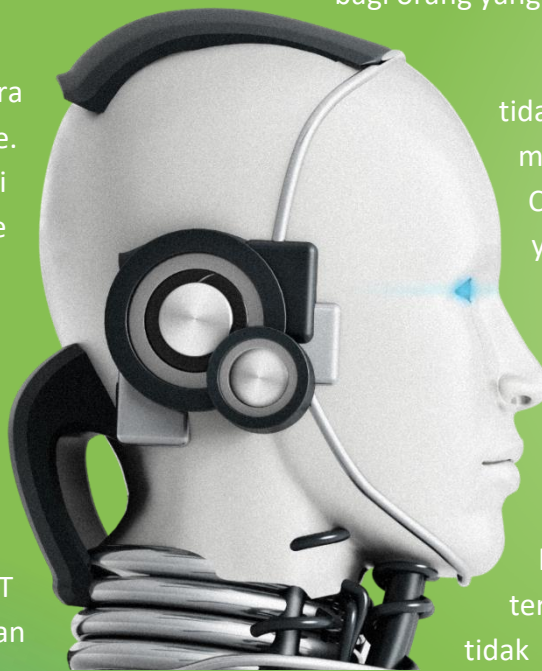
Chat GPT memang cara kerjanya mirip dengan Google. Namun keduanya memiliki perbedaan yaitu di mana Google cenderung mencari informasi berdasarkan URL (*Uniform Resource Location*) yang telah ditulis oleh seseorang dalam pencarian tersebut dan kemudian muncul gambar, teks, video dari server yang dibutuhkan. Sedangkan Chat GPT lebih menjabarkan penggambaran informasi yang ingin kita ketahui.

“Chat GPT ini sesuatu yang berbeda sebenarnya, dia cenderung mendeskripsikan apa yang ingin kita ketahui. Misalkan tentang Hutan Pinus, dia akan menjelaskan “hutan pinus itu apa?”, “adanya dimana?”, dan sebagainya.” Jelas Hamdani yang diwawancarai *Sketsa* pada Selasa (3/10) lalu.

Meskipun memiliki segudang informasi yang cukup membantu menyelesaikan pekerjaan manusia terkhusus di dunia akademik, Hamdani menyebutkan kekurangan dari penggunaan alat

canggih tersebut. Ia menjelaskan bahwa kemungkinan besar kesamaan jawaban yang muncul pada setiap orang berbeda pasti bisa saja terjadi. Maka dari itu ia menyarankan agar tidak serta merta menggunakan ChatGPT sebagai patok jawaban.

Mengenai keresahan akan hadirnya ChatGPT di kalangan masyarakat atau pun akademik, Hamdani menuturkan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ia malah menyebutkan kemajuan teknologi masa kini itu sangatlah menguntungkan bagi orang yang mau mengandalkannya.



“Yang dikhawatirkan orang yang tidak menggunakan. Misal anda menulis skripsi minta bantuan ChatGPT, ya tidak apa, tidak ada yang salah, tapi kita harus cari kalimat itu berdasarkan referensi dari mana juga gitu. Jadi harus tetap ada Sebutnya ChatGPT ini berguna sekali membantu kita tidak hanya menggali informasi tetapi juga membantu menyusun kata-kata yang sebelumnya tidak terpikirkan. ChatGPT dianggap secara tidak langsung menyokong proses penyusunan kalimat dalam menulis skripsi misalnya.

Kehadiran fitur AI tersebut yang sudah menjamur di kalangan mahasiswa maupun dosen juga tidak mungkin dibatasi. Karena teknologi akan selalu hadir dan terus berkembang hingga penggunaannya pada dunia akademik hanya bisa dikontrol oleh para individu yang menggunakannya.

“Saya yakin nanti kedepannya akan muncul lagi aplikasi yang menyerupai ChatGPT, mungkin

teknologinya akan lebih canggih atau hal yang lain.” Ucapnya.

Kegunaan Chat GPT memang tidak bisa dihindarkan di era gempuran teknologi yang semakin maju. Larangan penggunaannya pada dunia perkuliahan pun sulit untuk diterapkan karena kecerdasan buatan tersebut merupakan salah satu pilihan metode pembelajaran juga bagi kalangan penuntut ilmu.

Sehingga Hamdani menuturkan bahwa dosen sepatutnya mesti mafhum dengan mahasiswa yang memanfaatkan teknologi tersebut tanpa menghentikan mahasiswanya untuk mengerjakan tugas dengan menggunakan Chat GPT.

Ia menilai justru adanya Chat GPT dan fitur kecerdasan buatan masa kini merupakan tantangan bagi para dosen. Dosen harus siap dan juga mengikuti ritme perkembangan pemanfaatan teknologi yang terjadi di dunia pembelajaran. Seperti halnya pada saat pandemi yang menuntut semua dosen untuk menguasai alat bantu daring untuk pembelajaran tanpa bertatap muka.

“Sekarang lagi *trend* pakai ini, mau nggak mau kita juga harus belajar. Jangan sampai mahasiswanya lebih tau daripada dosennya. Karena mahasiswa ini kan lebih *update* menurut saya, banyak diskusi dengan temannya, mungkin saja bisa lebih *update* daripada dosennya. Jadi memang harus menyesuaikan, jangan gaptek. Mau tidak mau.” Tutur Hamdani yang diwawancarai langsung oleh awak *Sketsa*.

Hamdani berharap mahasiswa maupun dosen dapat bisa menguasai dan beradaptasi dengan kehadiran ilmu kecerdasan buatan yang hadir berdampingan di dunia perkuliahan sekarang. Karena penggunaannya yang tidak memerlukan

pelatihan secara khusus dan fitur yang dioperasikan juga tidak begitu rumit.

Namun Hamdani juga berpesan untuk berhati-hati dalam menggunakan ChatGPT yang berpotensi terjadi plagiarisme. Maka dari itu pemanfaatannya mesti tetap dipilah dan tidak ditelan secara mentah. Tetap harus mengedepankan sumber yang akurat, pasti dan tentu bisa dipertanggungjawabkan nantinya.

Tim Liputan: Widya Amanda, Sinar Aynul Rahma, Muhammad Andi Ryanto, Siti Nurmasiyah.

Editor: Marcello Ahimsa Hayamaputra

Di Mana? Saja

*Aku diberi pertanyaan pilihan ganda
Hanya opsi “ya” dan “tidak” yang ada
Aku khawatir dianggap mengada-ngada
Ketika memilih “ya”
Untuk pernyataan
“Kita bisa menuntut ilmu di mana saja.”*

*Aku diberi pertanyaan isian
“Kita bisa menuntut ilmu di ... saja.”
Aku khawatir dianggap kasihan
Ketika mengisi “mana”
Untuk kenyataan
“Kita bisa menuntut ilmu di sekolah saja.”*

*Sebenarnya kenapa ada kunci jawaban?
Katanya terserah, tapi harus
Katanya bebas, tapi terbatas
Kataku bagaimana?
Menuntut ilmu tapi tidak bisa di sekolah*

*Aku juga ingin terserah dan bebas
Di dunia terarah yang disebut universitas
Aku juga ingin terserah dan bebas
Di dunia mewah yang disebut belajar tanpa batas*

*Aku diberi pertanyaan esai
“Menurut anda, di mana kita bisa menuntut ilmu?”
Aku khawatir jalanku selesai
Ketika menjawab
“Di mana saja.”*

*Aku yakin jalanku belum selesai
Akhirnya kujawab
“Di sekolah— selama tidak seharga sawah.”*

*Puisi ditulis oleh Aulia Lun Ananda Putri, mahasiswi program
studi Ilmu Komunikasi,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2022*



Antara Impian dan Tanggung Jawab

Ilustrasi: freepik

“Habis lulus sekolah langsung cari kerja, ya, Kak”

Mira terdiam di tempat. Jemarinya yang sibuk mengupas kulit kacang tiba-tiba saja terasa ngilu. Dengan kedua pasang mata nanar miliknya, ia menoleh kepada si sumber suara, seorang wanita berusia setengah abad yang saat itu sedang menyapu halaman luar.

“Tapi kan Mira mau kuliah dulu, Bu,” responnya dengan suara sumbang. Gadis berusia tujuh belas tahun tersebut dapat melihat perubahan cepat di raut wajah sang ibu. Hal itu menambah kekusaran di dalam lubuk hatinya.

“Kakak kan tahu sendiri ibu nggak punya banyak uang.”

“Mira pasti akan cari beasiswa, kok, Bu. Mira juga bakal kerja atau jualan kecil-kecilan nantinya.”

“Kalau semua uangnya dipakai buat kuliah kamu, yang bantu ibu ngebiayain adik-adik kamu siapa nantinya?”

Mira hampir tersedak suaranya sendiri. “Adik-adik kan bukan tanggung jawab Mira, Bu.”

Fokus ibu terhadap kotoran dan daun-daun kering di teras rumah seketika teralihkan kepada Mira sepenuhnya. “Maksud kakak... kakak nggak ada niatan buat bantu keluarga sama sekali?”

“Bukan begitu, Bu,” timpal Mira. Ia hampir kehabisan kata-kata tapi belum mau menyerah begitu saja. “Mira tentu akan bantu cari tambahan

biaya buat sekolah Kiki dan Tia, tapi kan Mira juga harus kuliah—”

“Sudah, Mir,” potong ibu. “Kuliah nggak kuliah juga ujung-ujungnya kamu jadi ibu rumah tangga setelah menikah. Pokoknya kamu habis selesai SMA, langsung cari kerja aja, ya. Nggak usah buang-buang waktu buat kuliah. Ibu dapat kenalan tuh dari pak RT, dia lagi cari orang buat kerja jaga toko. Atau kamu cari kerja sendiri yang gajinya lebih banyak. Atau”



Semua ocehan ibu hanya berakhir di telinga kiri Mira. Gadis itu lebih memilih bergejolak dengan isi pikirannya sendiri dibanding melawan tuntutan ibunya yang sudah pasti tak mau dibantah.

Mira adalah salah satu murid paling berprestasi di sekolah. Minatnya terhadap pendidikan sangatlah besar, hal itu juga didasari oleh cita-citanya yang ingin menjadi seorang dosen di kemudian hari. Satu-satunya cara untuk memperoleh hal tersebut adalah dengan melanjutkan pendidikan setinggi mungkin.

Mira tahu kalau ia berasal dari keluarga yang kurang berada. Ayahnya hanyalah seorang buruh kasar dengan gaji sekurang-kurangnya dari UMR kota setempat. Ibunya merupakan seorang asisten rumah tangga yang setiap harinya bekerja

dari pagi hingga sore hari. Mira tak pernah ingin dianggap kurang bersyukur. Ia selalu merasa cukup selama masih bisa makan dan tidur di bawah atap dengan alas kasur nyenyaknya. Ia juga masih memiliki kesempatan untuk bersekolah hingga ke jenjang SMA. Tapi saat ini, Mira sungguh merasa kekurangan.

Satu langkah lagi. Hanya satu langkah lagi. Sudah di depan matanya tetapi tidak terjangkau oleh gapaian tangannya untuk mengubah mimpinya menjadi realita: kuliah.

Baru dua hari yang lalu ia melompat-lompat kegirangan karena berhasil masuk ke dalam barisan siswa *eligible*. Kerja keras yang ia tekuni tepat setelah menduduki bangku sekolah menengah atas langsung terbayarkan setelah namanya tertulis di antara tiga besar. Terlebih lagi, ia berkesempatan untuk mendapat beasiswa penuh atas prestasinya itu. Yang seharusnya ia lakukan saat ini hanyalah belajar, belajar, dan belajar. Tapi kenyataan tak seindah itu. Mira terjebak di tengah-tengah ekspektasi orangtua dan ekspektasinya sendiri.

Mira sebenarnya bisa melanjutkan kuliahnya jika ia tidak dibebani oleh tanggung jawab yang seharusnya tak diberikan kepadanya. Kedua adiknya, Kiki dan Tia saat ini masih duduk di bangku sekolah dasar. Mereka masih tak tahu menahu soal peliknya masalah ekonomi yang dialami keluarga mereka. Mira merasa terjebak di antara impian pribadinya dan tanggung jawabnya sebagai anak tertua. Ia menyadari bahwa ibunya, meskipun dengan kata-kata kerasnya, hanya mencemaskan masa depan Kiki dan Tia. Namun, Mira juga tahu bahwa jika ia tidak melanjutkan kuliah, mimpinya berkibrah di perguruan tinggi

sebagai seorang dosen akan selamanya tinggal angan-angan.

Mira terkadang bertanya-tanya, apakah ini memang kewajibannya sebagai anak tertua? Menjadi bagian dari tulang punggung keluarga sampai-sampai jerih payah yang telah berbuah ia tinggal begitu saja? Mira tak tahu apakah dia akan dicap sebagai anak tak tahu diri apabila ia melawan keras keinginan kedua orangtuanya. Ia tak tahu harus berbuat apa selain memilih salah satu dari kemungkinan yang bisa ia ambil.

Beberapa hari setelahnya, Mira kembali mencoba untuk berunding dengan kedua orangtuanya. Mencoba meyakinkan mereka kalau ia dapat membantu keluarganya meskipun sambil kuliah. Berulang dan berulang lagi, kata yang sama selalu terucap dari mulut wanita yang hampir berkepala lima tersebut.

“Sudahlah Mira..., ibu dan bapak tidak sanggup untuk membiayai kuliahmu dan menafkahi adik-adik kamu. Kita ini gak punya apa-apa. Gimana adik-adikmu sekolah? Besok mau makan apa kita kalau uang yang ada dipakai buat kuliah. Kakak sekolahnya sudah tuntas. Sekarang tolong bantu ibu, bapak, sama Kiki dan Tia. Ibu mohon kamu ambil pekerjaan yang sudah pak RT tawarin atau cari pekerjaan yang kamu sendiri mau.”

Mira beranjak berdiri secara tiba-tiba dan tidak lama suara gebrakan pintu terdengar. Mira berakhir mengunci dirinya sendiri di kamar. Menolak untuk keluar dan memilih menghabiskan setengah persediaan air matanya. Setidaknya ia

merasa seperempat dari bebannya seperti terurai bersamaan dengan air matanya.

Hari berganti hari, minggu berganti minggu, dan bulan berganti bulan. Mira menelan ludah pahitnya ketika menyaksikan teman-teman sekelasnya mulai mempersiapkan diri untuk merasakan euforia persiapan perkuliahan. Beruntungnya mereka yang tak terbebani oleh tanggung jawab finansial, Mira pikir. Mira tak pernah merasa seiri ini di dalam hidupnya. Andai orangtuanya mau bekerja lebih keras untuk menambah pundi-pundi rupiah, mungkin yang ia khawatirkan saat ini hanyalah diterima atau tidaknya dia oleh PTN impiannya. Yang hanya perlu ia curahkan hanyalah isi otak dan pikirannya alih-alih tenaga untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Orangtuanya masih memiliki pikiran yang dangkal dan kolot, hanya menganggap anak-anak layaknya sebuah investasi yang bisa mereka manfaatkan di kemudian hari.

Mira tak mau putus asa. Ia bertekad untuk mengubah jalan hidupnya meskipun tanpa bantuan maupun dukungan dari keluarganya. “Tiga kali ... aku masih punya kesempatan untuk kuliah selama tiga tahun,” bisiknya kepada dirinya sendiri. Mira tidak mau menyerah hanya karena satu atau dua faktor saja. Ia yakin kalau ia bisa menggapai mimpinya dan melanjutkan pendidikannya.

Beberapa bulan setelah kelulusannya, Mira mendapat pekerjaan sebagai seorang pramusaji di sebuah restoran cepat saji. Ia bekerja hingga delapan jam setiap harinya. Sepertiga dari gajinya diperuntukkan untuk kebutuhan kedua orang tua beserta adik-adiknya. Sisa gaji yang Mira miliki ia



tabung untuk berkuliah di tahun berikutnya. Sisa waktunya ia gunakan untuk belajar dan mempersiapkan diri menghadapi ujian masuk perguruan tinggi negeri idamannya, Universitas Gadjah Mada. Ia sudah bertekad kalau tanggung jawab yang ia miliki untuk membantu perekonomian keluarga tak akan menghalangi impiannya kelak untuk menjadi seorang dosen di kemudian hari. Toh pada akhirnya, ketika impian itu terkabulkan ia membantu keluarganya dengan lebih baik.

Penulis: Nazmiah Nur Fadillah

Editor: Marcello Ahimsa Hayamaputra



SURVEI: PANDANGAN MAHASISWA UNMUL TERHADAP RENCANA UNMUL MENJADI PERGURUAN TINGGI NEGERI BERBADAN HUKUM (PTN-BH)

**Periode Survei:
September – Oktober 2023**

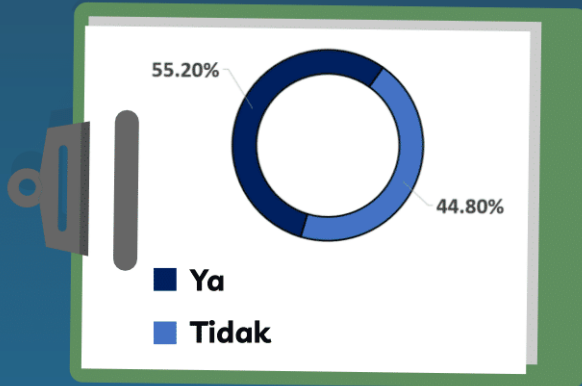


Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh pemerintah dengan status sebagai badan hukum publik yang memiliki otonom penuh dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Adanya status PTN-BH, memungkinkan universitas untuk mengelola finansialnya secara independen, sehingga universitas akan lebih leluasa dalam meningkatkan fasilitasnya baik secara akademik maupun non akademik. Kebebasan tersebut juga tercermin dalam rencana dan proses kerja sama yang dapat terjalin dengan beragam perusahaan atau instansi di masa depan. Selain adanya dampak positif, terdapat pula efek negatif yang dianggap dapat terjadi jika status PTN-BH ini berlaku.

Survei ini dilakukan oleh Divisi Penelitian dan Pengembangan (Litbang) LPM Sketsa Unmul dengan tujuan untuk menghimpun berbagai pandangan mahasiswa Unmul terkait wacana Unmul menjadi PTN-BH. Terdapat 212 responden yang berasal dari 13 fakultas di Unmul.

1

Apakah Anda telah mendengar isu Unmul akan menjadi PTN-BH?



Sebanyak 117 mahasiswa atau 55,2% responden yang menjawab pernah mendengar isu Unmul akan menjadi PTN-BH. Sedangkan sisanya sebanyak 44,8% responden atau setara 95 mahasiswa menjawab belum pernah mendengar isu tersebut.

2

Jika Anda telah mendengar isu Unmul akan menjadi PTN-BH, darimana Anda mengetahui isu tersebut?

36 Teman

35 Media Sosial

30 LPM Sketsa Unmul

6 Laman resmi Unmul

4 Kampanye Rektor

3 Para aktivis kampus

3 Debat pemira BEM KM

2 Berita lokal

1 Dosen

Responden memberikan jawaban bervariasi pada pertanyaan ini. Terdapat tiga jawaban teratas dari para responden yang mengetahui isu tersebut, yaitu dari teman sebanyak 36 jawaban, media sosial sebanyak 35 jawaban, dan LPM Sketsa Unmul sebanyak 30 jawaban.



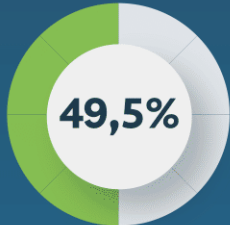
Apa yang Anda ketahui tentang PTN-BH?



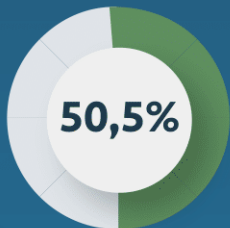
Dari 212 respon, terdapat 77 responden yang masih belum mengetahui tentang PTN-BH. Sebanyak 44 mahasiswa, menganggap dengan pemberian status PTN-BH universitas akan diberikan hak penuh dalam pengelolaan kampusnya termasuk ketika ingin membuat berbagai kebijakan baru. Sekitar 35 mahasiswa hanya menjawab kepanjangan dari PTN-BH yaitu Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. Lalu, 24 mahasiswa lainnya menjawab PTN-BH akan mampu mengelola keuangannya sendiri. Keuangan universitas tersebut dapat diperoleh dari berbagai bentuk kerja sama yang dilakukan dengan pihak swasta untuk menunjang pendanaan kampus. Sebanyak 20 mahasiswa menjawab jika PTN-BH adalah PTN yang sepenuhnya dikelola oleh negara dan tidak dapat dipindah tangankan termasuk kepada pihak swasta, meskipun mereka dapat menjalin kerja sama dengan pihak tersebut. Mahasiswa dengan jumlah 6 orang menganggap PTN-BH akan memiliki biaya kuliah yang lebih tinggi. Hal ini bukan tanpa alasan, sebab pemerintah akan membatasi bantuan dana pendidikannya. Seorang mahasiswa menjawab, PTN-BH berpotensi untuk dijadikan komersialisasi pendidikan. Terakhir, terdapat 5 mahasiswa dengan jawaban lainnya.



Menurut Anda apakah konsep PTN-BH ini cocok diterapkan di Unmul?



Ya

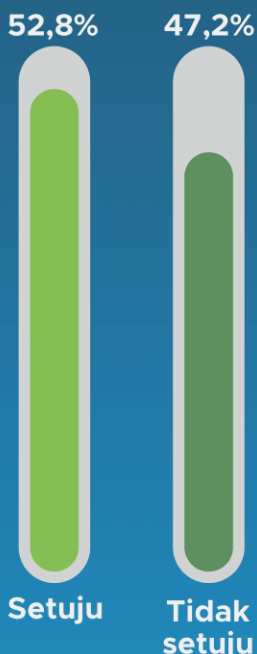


Tidak

Meskipun jawaban cukup berimbang, ternyata dari keseluruhan responden masih lebih banyak yang menjawab jika PTN-BH tidak cocok diterapkan di Unmul. Responden yang menjawab tidak yaitu sebanyak 50,5% atau setara 107 mahasiswa. Sisanya sebanyak 105 mahasiswa atau 49,5% lainnya menjawab ya (PTN-BH cocok diterapkan di Unmul).



Apakah Anda setuju jika implementasi PTN-BH ini akan mempengaruhi kenaikan UKT?



Sebanyak 112 responden menjawab setuju jika implementasi PTN-BH akan mempengaruhi kenaikan UKT, sedangkan 100 responden lainnya tidak setuju terkait hal tersebut.





Tahukah Anda terkait dampak apabila Unmul menerapkan PTN-BH?

Ya

69,3%

Tidak

30,7%

Sekitar 69,3% atau sebanyak 147 responden sudah cukup mengetahui terkait dampak-dampak yang mungkin terjadi ketika status universitas sebagai PTN-BH diterapkan. Namun, sekitar 30,7% lainnya atau sebanyak 65 responden masih belum mengetahui.



Dampak apa yang Anda ketahui apabila Unmul menerapkan PTN-BH?

- 143** Peningkatan biaya kuliah PTN
- 106** Adanya pengurangan dana subsidi PTN dari pemerintah
- 104** Kebijakan perguruan tinggi menjadi lebih fleksibel, seperti membuka dan menutup program studi sendiri
- 93** Rawan penyalahgunaan wewenang
- 77** Kesempatan dalam bermitra lebih terbuka
- 73** Meningkatkan kualitas dan reputasi PTN
- 35** Belum mengetahui dampaknya
- 6** Lainnya

Responden dengan 212 orang diberikan pertanyaan dengan kesempatan menjawab lebih dari satu sesuai dampak yang diketahui oleh responden. Jawaban terbanyak terkait dampak penerapan PTN-BH yaitu akan adanya kemungkinan peningkatan biaya kuliah. Jawaban ini dipilih oleh 143 responden atau 67,5% responden. Jawaban teratas lainnya yaitu adanya pengurangan dana subsidi PTN yang dipilih oleh 50% responden atau 106 mahasiswa dan kebijakan perguruan tinggi menjadi lebih fleksibel yang dipilih oleh 49,1% responden atau sebanyak 104 mahasiswa. Sebanyak 43,9% atau 93 mahasiswa juga menjawab penerapan PTN-BH akan menyebabkan kerawanan dalam penyalahgunaan wewenang. Meskipun demikian, masih banyak responden yang menjawab jika PTN-BH akan membuka kesempatan bermitra menjadi lebih terbuka dan meningkatkan kualitas serta reputasi PTN. Masing-masing dampak tersebut dipilih sebanyak 36,3% dan 34,4% responden. Sebanyak 16,5% atau 35 mahasiswa masih belum mengetahui dampak PTN-BH dan 6% sisanya menjawab jawaban lainnya.



Apakah Anda setuju apabila Unmul menerapkan PTN-BH?



Dari keseluruhan 212 responden, lebih dari setengahnya yaitu sebanyak 58% atau 123 mahasiswa memilih tidak setuju jika Unmul menerapkan PTN-BH. Namun, masih ada 42% atau 89 mahasiswa yang setuju terhadap penerapan PTN-BH.



Apa alasan Anda jika menyetujui Unmul menjadi PTN-BH?

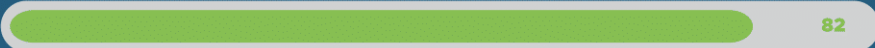
- 16** Untuk mempercepat perbaikan dan pengembangan kampus baik dari segi infrastruktur maupun pengelolaan di dalamnya
- 13** Agar semakin meningkatkan kualitas pendidikan dan reputasi PTN
- 9** Keleluasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri agar lebih berkembang pesat dalam mencari mitra dan pengelolaan finansial secara mandiri
- 8** Universitas menjadi lebih fleksibel dan mengurangi intervensi dari pemerintah
- 1** Upah tenaga pengajar akan sesuai dengan kinerjanya masing-masing
- 1** Agar menjadi PTN-BH pertama di Kalimantan

Berikut adalah rangkuman alasan mengapa para responden tersebut setuju apabila Unmul menjadi PTN-BH. Alasan terbanyak yaitu agar Unmul dapat mempercepat peningkatan infrastruktur dan pengelolaan manajemen di dalamnya. Ketika menjadi PTN-BH diharapkan kampus bisa semakin maju dan berkembang. Hal ini juga tercermin dari banyaknya responden yang beralasan menyetujui karena ingin melihat Unmul semakin meningkatkan kualitas akademiknya dan reputasi PTN agar tidak kalah bersaing.



Apa alasan Anda jika tidak menyetujui Unmul menjadi PTN-BH?

Tidak menginginkan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT)



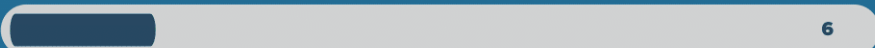
Rawan penyalahgunaan kekuasaan



Sarana dan prasarana kampus yang belum memadai serta masih adanya gedung mangkrak yang berpotensi menambah beban PTN



Belum saatnya



Harusnya ada sosialisasi terlebih dahulu kepada mahasiswa tentang apa itu PTN-BH



Dari para responden yang menjawab alasan-alasan mereka tidak menyetujui Unmul menjadi PTN-BH, jawaban teratasnya adalah karena tidak menginginkan adanya kenaikan UKT. Alasan tersebut dipilih oleh 82 responden. Alasan lainnya adalah karena kekhawatiran terhadap penyelewengan kekuasaan seperti adanya tindak korupsi. Sarana dan prasarana Unmul juga dianggap belum memadai untuk menjadi PTN-BH. Para mahasiswa yang menjawab pertanyaan ini juga mengharapkan setidaknya ada sosialisasi terlebih dahulu tentang apa itu PTN-BH karena masih banyak yang awam akan hal.



1000 Guru Samarinda: Dedikasi Para Anak Muda untuk Memajukan Pendidikan Indonesia

Berangkat dari kepedulian mereka terhadap masa depan anak-anak pedalaman, 1000 Guru Samarinda hadir untuk mengajak anak muda memberikan inspirasi kepada penerus negeri. Didirikan sejak tahun 2015 silam, komunitas sosial ini bergerak di bidang pendidikan, yang ke depannya akan menyambangi sekolah-sekolah di desa terpencil Kalimantan Timur.

1000 Guru Samarinda bertujuan untuk menyebarluaskan pengalaman pendidikan ke seluruh desa terbelakang, pun memberikan pengalaman bagi para pendidik non formal untuk merasakan mengajar di sekolah yang fasilitasnya belum

memadai.

Azizah Nur'Aini Darulyati, Ketua 1000 Guru Samarinda mengajak anak pedalaman untuk tak berhenti di pendidikan sekolah dasar, tetapi terus berlanjut hingga ke pendidikan yang lebih tinggi.

"Kita (1000 Guru Samarinda) kasih motivasi mereka buat terus lanjut sekolah, karena di pedalaman itu rata-rata hanya ada SD. Kalau mereka mau lanjut SMP, harus yang di Kabupaten, harus pindah kota, dan itu kita kasih motivasi buat mereka biar tetap lanjut sekolah, apa pun yang terjadi," jelas Azizah.

Komunitas ini memiliki kegiatan yang beragam dalam bidang

pendidikan. Divisi-divisi di komunitas ini tak terlepas untuk berperan aktif dalam mempersiapkan dan



Abdul Gholib Mokotoloy
Volunteer Komunitas 1000 Guru Samarinda

KOMUNITAS

menjalankan kegiatan yang mereka canangkan.

Awak *Sketsa* berkesempatan menemui tim pengurus komunitas 1000 Guru Samarinda. Mereka menerangkan tugas-tugas yang harus mereka jalankan sesuai dengan masing-masing divisi. Abdul Gholib, salah satu anggota Divisi *Field Surveyor* menerangkan bahwa ia bertugas untuk melakukan survei sekolah dan lokasi *travelling* untuk kegiatan setelah mengajar.

Sementara Divisi Logistik bertugas untuk memenuhi barang-barang kebutuhan komunitas “Untuk Hari-H kegiatan atau ketika mau mengadakan kegiatan, *nih*, misalnya mau T&T, yang mencari kebutuhan divisi lain itu dari kami, Tim Logistik yang bertanggung jawab, sama barang-barang yang di lapangan itu juga dari Tim Logistik,” terang Elita selaku koordinator Divisi Logistik.

Adapun Divisi *Creative* yang bertugas untuk mempersiapkan modul pembelajaran yang telah disesuaikan dengan jenjang kelas dan aspek pengetahuan siswa. Mengusung pembelajaran *Fun-Learning*, kegiatan belajar-mengajar dirancang agar menjadi lebih menyenangkan dan nyaman untuk diikuti siswa. Materi yang diajarkan di antaranya adalah mengenal hewan dan tumbuhan, mata uang, pengenalan wilayah nusantara, berhitung, hingga eksperimen sains.

Anisa Hidayati selaku anggota Divisi *Medic* menuturkan, tidak hanya melakukan survei sekolah, 1000 Guru Samarinda turut menengok keadaan lingkungan sekitar sekolah. Apabila masyarakat desa tersebut memerlukan bantuan medis, utamanya pemeriksaan kesehatan dan bekerja sama dengan tim

bantuan medis. Terakhir, terdapat Divisi *Marketing & Public Realtions* (MPR) yang bertugas mengelola media sosial dan menjaga 1000 Guru Samarinda agar tetap eksis.

1000 Guru Samarinda kerap menjalin bekerja sama dengan sejumlah komunitas lainnya di Samarinda. Beberapa waktu lalu, mereka melaksanakan *Teaching and Travelling* (T&T) yang merupakan salah satu program yang sering dijalankan dari komunitas ini.

1000 Guru Samarinda pun sempat menyambangi sekolah filial di Kecamatan Muara Badak dengan menggandeng Paragon Group. sebagai mitra. Mereka mengungkapkan bahwa Indonesian Off-Road Federation (IOF) beberapa kali mendukung perjalanan 1000 Guru Samarinda ketika mengunjungi sekolah-sekolah terpencil.

Sumber pendanaan komunitas berasal dari uang sukarela pengurus. Tak lebih, hanya pengalaman berharga yang bisa dijanjikan kepada relawan yang ingin bergabung. Azizah pun menegaskan bahwa 1000 Guru Samarinda tidak akan menjadi bimbingan belajar untuk meraih profit tertentu, karena dirasa menjadi lebih formal dan monoton.

Komunitas akan terus independen dalam menjalankan misi mereka. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh pengurus, relawan, maupun mitra yang memiliki berbagai kesibukan masing-masing, sehingga perlu menyesuaikan jadwal untuk melaksanakan kegiatan.

Ketika merayakan Hari Anak Nasional, Annisa Azizah mengaku sempat pesimis ketika membuka



KOMUNITAS

stan di Gor Sempaja dikarenakan sepi pengunjung dan kurangnya peminat untuk berkunjung.

“Kita di situ ada stan gambar, setelah itu kita ada stan kesehatan juga, dan ternyata, ya, ibu-ibu yang datang ke situ sambil bawa anak-anaknya, ibu-ibunya di (stan) kesehatan, anak-anaknya sama kami di (stan) gambar sambil kita juga siapin buku-buku. Jadi, kalau anak-anak itu sudah selesai menggambar, kita apresiasi mereka dengan cara kita kasih hadiah kayak kotak pensil atau apa, gitu. Kalau misalkan dia mau buku, ya, silakan ambil aja bukunya, gapapa, gitu, *sih*. Sejauh ini masih itu (yang kita lakukan),” bebernya.

Hadirnya komunitas 1000 Guru diharapkan dapat memacu semangat para anak-anak muda, utamanya di Samarinda untuk tetap peduli akan pentingnya pendidikan, serta ikut andil dalam memajukan pendidikan anak-anak Indonesia, terkhusus di daerah yang tidak memadai. Melalui komunitas ini, para relawan dapat belajar,

membangun relasi, dan tentunya menjadi perantara berbagai pihak dalam menyalurkan ide-ide tentang pendidikan.

“Satu aja, *sih*, kita lebih pengen anak muda buat ikut berpartisipasi secara jiwa, raga, material, dan lain-lain untuk menunjukkan bahwa sebenarnya kita ke pedalaman itu pernah ikut bukan ngajar satu tambah satu. Enggak. Kita lebih kasih mereka motivasi, karena, 1000 Guru itu lebih ke peran anak mudanya. Bagaimana para anak muda bisa berperan di pedalaman,” kunci Azizah mantap.

Tim Liputan: Sari Dewi Handayani, Salwa Ayu Rofiah, Wisda Aprilia Syaka, Novia Rahmawati Ananda.

Editor: Audrey Apridella Moudini



Potret Fasilitas Unmul: Sudahkah Layak Menyandang Status PTN-BH?



Sebagai strata tertinggi dalam status perguruan tinggi, kampus yang menyandang PTN-BH tentunya perlu memperhatikan fasilitas yang mereka tawarkan. Hal ini jadi salah satu syarat untuk bertransformasi menjadi badan hukum. Lantas, apakah Unmul telah memenuhi persyaratan tersebut?

Menyorot masalah menahun terkait sarana prasarana di Unmul, kondisi Student Center (SC) Unmul tentunya termasuk dalam salah satu permasalahan ini. Diketahui sebelumnya bahwa SC merupakan lahan bagi mahasiswa berorganisasi di Unmul, akan tetapi kelayakan bangunan tersebut masih dipertanyakan. Beberapa kali artikel berita mengenai keadaan SC dilaporkan oleh Sketsa, namun hingga kini masih belum ada titik terang mengenai langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya oleh pihak kampus.

Dikutip dari artikel Wansus yang diterbitkan *sketsaunmul.co* berjudul *Mengintip Masa Depan Unmul Lewat Kacamata Abdunnur*. Rektor Unmul tersebut menyebut, pengelolaan dan pemeliharaan Gedung SC seyogianya masih harus dilakukan sinergi antara Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dengan segenap pihak terkait.

“Kita harus transparan, bahwa Student Center benar-benar digunakan untuk kegiatan kemahasiswaan atau





tidak. Semua aset akan dikelola oleh universitas, namun kita tentunya turut memprioritaskan penggunaan dan pemanfaatan untuk kegiatan kemahasiswaan," tegas Abdunnur seperti yang dikutip dalam laman *sketsaunmul.co*.

Tak ketinggalan menyoroti kondisi dari Taman Unmul yang menjadi salah satu tempat favorit mahasiswa. Letaknya yang strategis di pusat kampus menjadikannya sebagai tempat yang kerap ramai dikunjungi untuk sekadar melepas penat hingga menjadi sarana untuk melakukan kegiatan kemahasiswaan.

Fasilitas yang disuguhkan di taman tersebut di antaranya adalah stan penjual minuman dan makanan yang memudahkan mahasiswa untuk mencari pengganjal perut. Namun, adanya fasilitas tersebut justru bermuara ke permasalahan baru:

sampah.

Hingga kini, taman tersebut kerap terlihat kumuh dan tidak terawat akibat banyaknya sampah yang berserakan. Fasilitas lainnya seperti tempat duduk yang berbahan dasar kayu itu pun mulai usang seiring berjalannya waktu.

Tak ketinggalan, awak *Sketsa* mewawancarai salah satu mahasiswi yang sedang mengunjungi Taman Unmul. Ia adalah Ester Lina. Sederet kritik dan saran ia sampaikan, mulai dari penambahan tempat sampah, perbaikan payung untuk berteduh, hingga wastafel.

"Kalau bisa, ditambah lagi tempat sampahnya. Apalagi di spot-spot yang lumayan ramai, tetapi bak sampahnya harus tertata rapi supaya tidak mengganggu orang-orang yang sedang duduk di situ dengan baunya" ujar Ester.



Awak *Sketsa* turut melawat ke FKIP Banggeris untuk menengok kondisi dari fasilitas yang ada di kampus tersebut. Berdasarkan pantauan awak *Sketsa*, interior kelas sudah cukup usang dengan cat tembok yang mulai rontok. Sementara fasilitas di luar kelas seperti taman masih terlihat cukup baik. Terdapat sejumlah mahasiswa yang mengerjakan tugas di gazebo yang berada di tengah pepohonan rindang.

Ketika menyusuri kelas, fasilitas dasar untuk mengajar sudah cukup mumpuni: terdapat dua pendingin udara, 1 LCD proyektor beserta kain polyester sebagai layarnya, serta TV yang cukup besar. Meskipun begitu, papan tulis yang terpajang di kelas sudah terlihat usang dengan bekas tinta-tinta permanen.

Meski fasilitas dinilai cukup baik, Zulfikar, mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah, FKIP 2017 mengeluhkan keterlambatan FKIP dalam melakukan pembangunan dan perbaikan fasilitas.

“Sedangkan saya melihat fakultas-fakultas lain, mereka sudah ber-AC, tapi kami hanya kipas angin,” keluh Zulfikar kepada *Sketsa*, Jumat (13/10) lalu.

Dirinya turut merasakan perbedaan ketika ia masih berada di semester awal hingga sekarang. Ia merasa bahwa FKIP hanya berfokus memperbaiki fasilitas di dalam kelas. Sementara itu, ia memandang bahwa tak ada yang berubah dari fasilitas non



akademis. Ujarnya, lapangan basket yang dipakai mahasiswa berolahraga kini sudah hancur.

Bergeser ke kawasan rimba, terpantau terdapat bangunan kayu yang telah kokoh berdiri di sana. Pada 27 September 2023, bertepatan dengan Dies Natalies Unmul yang ke-61, Fahutan meresmikan bangunan tersebut yang dinamakan "Rumah Kayu". Meski berbahan dasar kayu, rumah tersebut dilengkapi dengan teknologi modern. Diketahui bangunan unik itu menggunakan tenaga surya sebagai energi terbarukan. Rumah ini dirancang dan didesain oleh Ideal Borneo dan diproduksi oleh masyarakat binaan PT MHU dan Ideal Borneo.

Tim Liputan: An Nisa, Aditya Fahrul Setiawan, Adzra' Dhiya' Millati, Alya hanifah, Dea Arilia Sari, Achmad Fadly, M. Andan Qahfi, Nur Rahmasari, Rafael Sangga, Zaynab Army Sijaya.

Editor: Audrey Apridella Moudini





MAJALAH

Sketsa

Suara Kritis & Edukatif Mahasiswa

